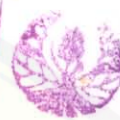


PENILAIAN KINERJA PERBANKAN SEBELUM DAN  
SESUDAH PROGRAM BANTUAN LIKUIDITAS  
BANK INDONESIA (BLBI)

(Studi Kasus : Bank Central Asia, Bank Danamon, dan Bank Tiara Asia)

SKRIPSI



UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER



Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember

Oleh: Ngadimin  
No. Induk: 990810201091  
Terima: 11 JUN 2003  
SRS

S  
Klass  
658.15  
NGA  
P  
0.1

Ngadimin  
NIM : 990810201091

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2003

## JUDUL SKRIPSI

PENILAIAN KINERJA PERBANKAN SEBELUM DAN SESUDAH  
PROGRAM BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)  
( Studi Kasus : bank Central Asia, Bank Danamon, dan Bank Tiara Asia)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a Ngadimin

N. I. M. 990810201091

Jurusan Manajemen

telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

19 April 2003

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

### Susunan Panitia Penguji

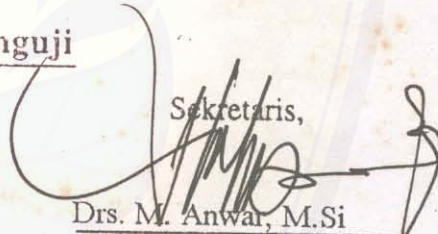
Ketua,



Tatang A.G. M. Buss. Acc. Ph.D

NIP. 131 960 488

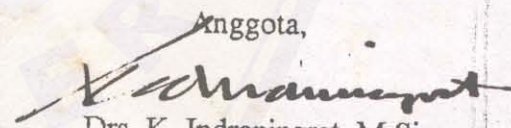
Sekretaris,



Drs. M. Anwar, M.Si

NIP. 131 759 768

Anggota,



Drs. K. Indraningrat, M.Si

NIP. 131 832 337



Mengetahui/Menyetujui

Universitas Jember

Fakultas Ekonomi

Dekan,

Drs. H. Liakip, SU

NIP. 130 531 976

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penilaian Kinerja Perbankan Sebelum dan Sesudah Program Bantuan Likuiditas Bak Indonesia (BLBI) (Studi Kasus Pada Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Tiara Asia)

Nama Mahasiswa : Ngadimin

N.I.M : 990810201091

Jurusan : Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Pembimbing I



Drs. Ketut Indraningrat, M.Si

NIP. 131 832 337

Pembimbing II



Dra. Lilik Farida, M.Si

NIP. 131 838 328

Ketua Jurusan



Dra. Diah Yulisetiarni, M.Si

NIP. 131 624 474

Tanggal Persetujuan : 20 Maret 2003

Kupersembahkan Karya Sederhana ini Untuk :

- ☞ Bapak dan Ibu yang aku hormati dan aku kasih yang senantiasa memberi do'a restu dalam pencapaian cita-citaku semenjak kecil hingga aku dewasa,
- ☞ Lih, Waris dan Bi Neng yang selalu memberikan motivasi dan fasilitas selama aku menjalani kuliah di Jember,
- ☞ Kakakku tersayang Wagirin dan adik-adikku tercinta, Tri Santoso dan Puji Lestari yang memberikan aku tanggung jawab untuk mencapai yang terbaik,
- ☞ Lih Tus, Tursino, Helly, Yuli, Yusup, dan Ayu yang telah mengisi keceriaan hari-hariku.
- ☞ Sahabat-sahabatku tercinta yang telah menemani dan memenuhi hari-hariku dengan kenangan suka maupun duka.
- ☞ Bapak dan Ibu Dosenku yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagiku.
- ☞ Almamterku.

## MOTTO :

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Qs. Alam Nasyrah : 6-8)

“Hidup adalah perjuangan, maka perjuangkanlah hidupmu”

(Ngadimin)

“Ketidakgagalan itu bukan terletak dalam keadaan tak pernah gagal, melainkan bangkit selalu apabila akan gagal”

(Napoleon Bonaparte)

“Tiada kesuksesan tanpa pengorbanan”

(Ngadimin)

“Belajar tanpa berfikir tak ada gunanya, berfikir tanpa belajar adalah sangat berbahaya”

(Confuschius)

“Masa lalu adalah kenanganmu, masa sekarang adalah perjuanganmu, masa depan adalah tujuanmu”

(Ngadimin)

## ABSTRAKSI

Skripsi dengan judul Penilaian Kinerja Perbankan Sebelum dan Sesudah Program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan atas kinerja keuangan keuangan bank sebelum dan sesudah program BLBI.

Penelitian ini dilakukan dengan mengamati laporan keuangan tahunan bank yang dipublikasikan. Penelitian ini dilakukan dengan metode *even study* dengan populasi penelitiannya terdiri dari Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, dan Bank Tiara Asia. Adapun periode penelitiannya dari tahun 1996 sampai 1999, yang terbagi dua yaitu 2 (dua) tahun sebelum program BLBI (1996 dan 1997), dan 2 tahun sesudah program BLBI (1998 dan 1999). Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Bank Indonesia, *Bank Market Directory* tahun 1997, 1998, 1999, 2000, dan *Harian Kompas*. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data keuangan bank yang bersumber dari laporan keuangan tahunan bank, nama-nama bank penerima BLBI, jumlah dana BLBI yang diterima bank-bank penerima.

Untuk menilai kinerja perbankan penerima dana BLBI digunakan rasio CAMEL yang terdiri dari CAR (*Capital Adequacy Ratio*), RORA (*Return On Risked Assets*), NPM (*Net Profit Margin*), CRR (*Credit Risk Ratio*), ROA (*Return On Assets*), BOPO (Biaya Operasi Pendapatan Operasi), dan LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji t dua sisi (*two tailed test*).

Pengujian hipotesis menggunakan tingkat signifikansi 5%. Dari ketujuh rasio CAMEL yang di uji ternyata tidak satupun yang signifikan, hal ini berarti hasil penelitian menerima hipotesis nol dan menolak hipotesis alternatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan atas kinerja BCA, Bank Danamon, dan Bank Tiara Asia sebelum dan sesudah program BLBI. Dengan kata lain program BLBI yang dilakukan untuk menyelamatkan bank-bank yang kesulitan likuiditas tidak berjalan dengan efektif.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan judul “Penilaian Kinerja Perbankan Sebelum dan Sesudah Program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) (Event Study pada Bank Central Asia, Bank Danamon, dan Bank Tiara Asia), yang dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Dengan terwujudnya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, baik secara materiil maupun spiritual, karenanya dalam kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Liakip, SU selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember,
2. Bapak Drs. Ketut Indraningrat, MSi selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dra. Lilik Farida, MSi selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak bantuan dan bimbingan sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan,
3. Bapak Medi (Bank Indonesia) yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyediaan data penelitian ini,
4. Bapak Drs. Hari Sukarno, MSi yang telah memberikan banyak masukan dan kesediaannya untuk berdiskusi mengenai skripsi ini,
5. Ibu Dra. Hj. Suhartini Sudjak selaku Dosen Wali yang banyak memberikan nasehat,
6. Bapak dan Ibunda terkasih yang senantiasa memberi do'a restu demi keberhasilan dalam mencapai cita-citaku semenjak aku kecil hingga aku dewasa,
7. Bapak Drs. Waris, MKes dan Bi Neng yang telah memberikan bantuan materiil maupun spirituil kepadaku selama di Jember,

8. Kakakku Wagirin dan adik-adikku Tri Santoso dan Puji Lestari tersayang yang telah memberikan tanggung jawab kepadaku untuk mencapai yang terbaik,
9. Saudara-saudaraku, Lik Tus, Tursino, Yusup, Ayu, Helly dan Yuli yang telah mengisi keceriaan hari-hariku,
10. Keluarga besar Bapak Madarjo dan Bapak (Alm) Samulya di Cilacap yang telah memberikan dorongan moral yang begitu besar dalam pencapaian cita-citaku,
11. Teman-temanku , Ira, Anis, Ifanto yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini,
12. Teman-temanku seperjuangan, Repto, Huda, dan semua penghuni Jalan Belitung I/19A
13. Arifin, Tiko, Eko, Yoyok, dan keluarga besar KSKIK serta keluarga besar Manajemen '99 ganjil.
14. Keluarga besar ORBID sebagai tempatku mengaktualisasikan diri,
15. Bapak Didit (Setan), Mama dan Febby, terima kasih atas waktu dan perhatian yang selama ini kalian berikan,
16. Bapak Toyib, Cahyo, Yuda, Priyo, Harto, Akbar dan semua rekan-rekan di Perumahan Bedadung Indah yang telah mengisi hari-hariku dengan keceriaan,
17. Desy, Martia, dan Wulan (Trio Kwek-kwek) yang selalu menceriakan hari-hariku,
18. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Perpus Pusat Universitas Jember,
19. Semua pihak yang mungkin lupa kusebutkan yang telah ikut berperan atas selesainya karya sederhanaku ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis sangat berterima kasih atas saran dan kritik yang bersifat membangun. Penulis juga berharap, meskipun penulisan skripsi ini jauh dari sempurna namun sedikit banyak dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, Februari 2003

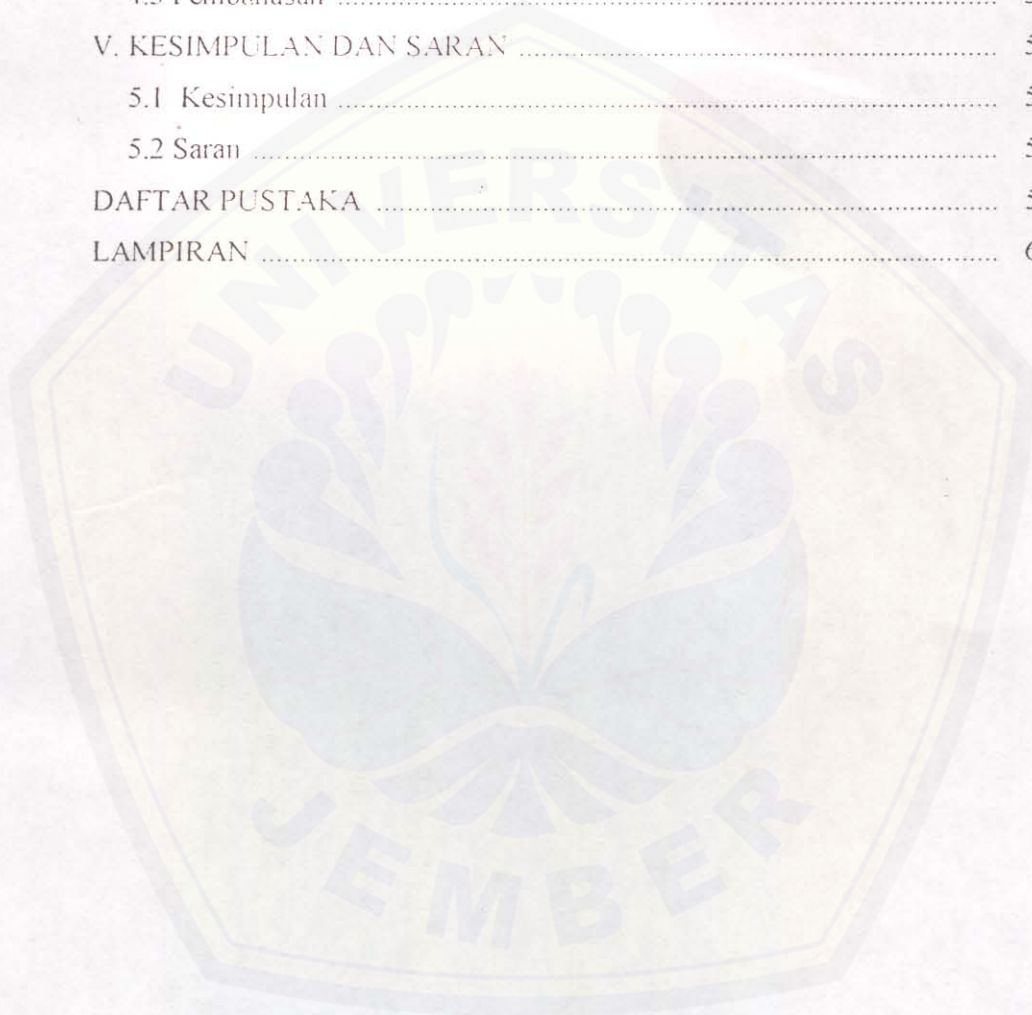
Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	5
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	5
2.2 Landasan Teori .....	6
2.2.1 Perbankan .....	6
2.2.2 Program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) .....	11
2.2.3 Penilaian Kinerja Keuangan Bank .....	26
2.3 Hipotesis .....	32
III. METODE PENELITIAN .....	33
3.1 Obyek dan Periode Penelitian .....	33
3.2 Populasi dan Sampel .....	33
3.3 Identifikasi Variabel .....	35
3.4 Definisi Operasioanl Variabel dan Pengukurannya .....	36
3.5 Data dan Metode Pengumpulan Data .....	37
3.6 Teknik Analisa Data .....	38

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah.....	40
IV. HASIL PENELITIAN, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Perbankan .....	42
4.2 Analisis Data .....	44
4.2.1 Analisis Deskriptif .....	44
4.2.2 Uji Hipotesis .....	52
4.3 Pembahasan .....	54
V. KESIMPULAN DAN SARAN .....	56
5.1 Kesimpulan .....	56
5.2 Saran .....	56
DAFTAR PUSTAKA .....	58
LAMPIRAN .....	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah..... 40

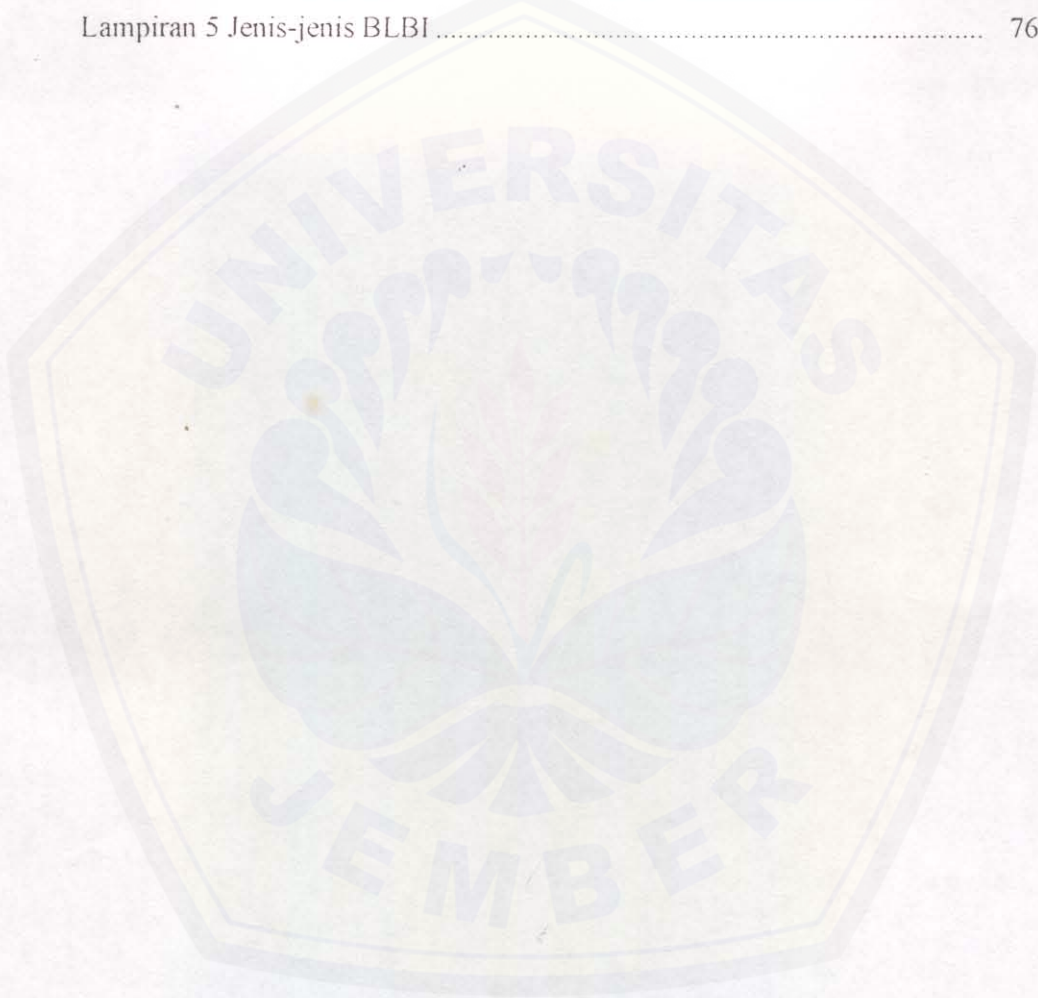


DAFTAR TABEL

Table 2.1 Jumlah Fasilitas SBPU Khusus.....	17
Table 2.2 Fasilitas Dana Talangan Valas yang Dialihkan Kepada Pemerintah (Posisi tanggal 29 Januari 1999) .....	19
Table 2.3 Fasilitas Dana Talangan Rupiah yang Dialihkan Secara Cessie (Posisi tanggal 29 Januari 1999) .....	20
Table 2.4 Nama Bank Penerima BLBI Beserta Jumlahnya .....	20
Table 3.1 Daftar Nama Bank-Bank Penerima BLBI .....	34
Table 4.1 Perkembangan Rasio CAR.....	44
Table 4.2 Perkembangan Rasio RORA.....	45
Table 4.3 Perkembangan Rasio NPM.....	46
Table 4.4 Perkembangan Rasio CRR.....	47
Table 4.5 Perkembangan Rasio ROA .....	49
Table 4.6 Perkembangan Rasio BOPO .....	50
Table 4.7 Perkembangan Rasio LDR.....	51
Table 4.8 Hasil Uji t 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah program BLBI..	52
Tabel 4.9 Hasil Uji t 1 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah program BLBI..	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Keuangan Bank .....	61
Lampiran 2 Perhitungan Rasio CAMEL .....	63
Lampiran 3 Hasil Perhitungan Rasio CAMEL .....	67
Lampiran 4 Uji t Dua Sisi ( <i>Two Tailed Test</i> ).....	68
Lampiran 5 Jenis-jenis BLBI .....	76



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak bulan Juli 1997 telah memporakporandakan sendi-sendi perekonomian bangsa yang selama beberapa dekade telah dibangun dengan susah payah oleh bangsa Indonesia. Setidaknya ada 3 (tiga) titik lemah perekonomian Indonesia yang telah mengakibatkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, yaitu : kondisi moneter yang tidak stabil, kondisi perbankan yang lemah, kondisi dunia usaha yang dibebani masalah hutang. Kondisi ini diperparah dengan tidak stabilnya situasi sosial politik, sehingga mengakibatkan rendahnya kepercayaan para pelaku ekonomi terhadap prospek pemulihan ekonomi, khususnya dunia perbankan.

Kepercayaan masyarakat pada bank-bank nasional runtuh. Kekhawatiran akan terjadinya pencabutan ijin usaha bank dan tidak adanya program penjaminan simpanan telah menyebabkan kepanikan masyarakat atas keamanan dananya diperbankan. Hal ini mendorong masyarakat melakukan penarikan secara besar-besaran atas dana mereka dari bank yang mereka anggap kurang sehat untuk dipindahkan pada bank yang lebih sehat. Sebagai gambaran, uang kartal yang dipegang masyarakat melonjak tajam dari Rp 24,9 trilyun pada akhir Oktober 1997 menjadi Rp 37,5 trilyun pada akhir Januari 1998, dan jumlah ini terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli 1998 yang mencapai Rp 45,4 trilyun. Kondisi seperti ini telah mengakibatkan banyak bank mengalami kesulitan likuiditas yang cukup parah.

Guna memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, pada akhir Januari 1998 Pemerintah mengambil kebijakan memberikan jaminan pembayaran atas kewajiban bank-bank atas kewajiban bank-bank umum kepada deposan dan kreditur dalam dan luar negeri (*blanket guaranty*) dan pembentukan BPPN untuk melakukan langkah penyehatan atas bank-bank yang bermasalah. Namun, kedua kebijakan pemerintah tersebut belum memadai. Krisis perbankan belum mereda, bahkan telah meluas dan mengarah pada lumpuhnya sistem perbankan nasional (Djiwandono, 1999).



Dalam penyelenggaraan perekonomian negara, diyakini bank memiliki peranan strategis sebagai penggerak roda perekonomian – baik dari segi pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, pengalihan dana maupun penyaluran kredit – sehingga tindakan penyehatan atas perbankan bermasalah merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan. Dalam konteks keadaan ekonomi seperti inilah, kebijakan penyaluran BLBI berlangsung. Dimana bantuan likuiditas harus diberikan agar bank mampu menjalankan kegiatan operasionalnya, selain itu untuk memberikan jaminan atas dana masyarakat yang ada di bank.

Secara yuridis, sebetulnya penyaluran BLBI itu sesungguhnya bukan merupakan kebijakan yang baru dan mendadak diciptakan. Kebijakan itu telah dilakukan jauh sebelum terjadinya krisis moneter dan memiliki landasan hukum BI yang lama yaitu UU No 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Pasal 32 ayat (3) UU No.13 Tahun 1998 menyebutkan “Bank Indonesia dapat pula memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat”. Sedangkan pasal 37 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 menegaskan “Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka BI dapat mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Penilaian kinerja perbankan sebelum dan sesudah program penyaluran dana BLBI perlu dilakukan, karena berguna bagi para pemegang saham, masyarakat dan bagi pihak manajemen bank yang bersangkutan. Pemegang saham memerlukan informasi kinerja keuangan bank agar dana modal yang ditanamkan ada jaminan telah dioperasikan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan alokasi dana. Sedangkan bagi pihak manajemen bank dapat digunakan untuk mengukur apakah dana BLBI yang diterima sudah dijalankan dengan baik dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap kinerja perbankan.

Kinerja perbankan dapat dinilai melalui berbagai macam variabel ataupun indikator. Sumber utama variabel atau indikator yang dijadikan dasar penilaian tersebut adalah laporan keuangan perusahaan perbankan yang bersangkutan.

Berdasarkan laporan keuangan ini dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang dilajimkan untuk dijadikan dasar penilaian kinerja perbankan.

## 1.2 Pokok Permasalahan

BLBI merupakan fasilitas dari Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan sistim pembayaran dan sektor perbankan agar jangan terganggu karena ketidakseimbangan (*mismatch*) antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penilaian kinerja perbankan sebelum dan sesudah program BLBI perlu dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana BLBI tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana kinerja perbankan sebelum dan sesudah program BLBI?
- 2) Apakah terdapat perbedaan (meningkat atau menurun) yang signifikan atas kinerja bank sebelum dan sesudah program BLBI?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui kinerja perbankan sebelum dan sesudah program BLBI.
- 2) Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kinerja perbankan sebelum dan sesudah program BLBI.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai beda kinerja perbankan sebelum dan sesudah program BLBI diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak:

- 1) Bagi Perbankan

Dapat memberikan gambaran atas efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana BLBI oleh pihak bank yang tertuang dalam kinerja perbankan yang bersangkutan.

- 2) Bagi Akademisi

Diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai studi tentang perbankan.



3) Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan mengenai pengembangan dunia perbankan di Indonesia.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Rasio-rasio keuangan banyak digunakan oleh para peneliti terdahulu untuk mengukur kinerja perbankan. Ahmad (2001) melakukan penelitian mengenai kinerja perbankan sebelum dan sesudah krisis untuk bank yang *listed* di Bursa Efek Jakarta. Dia mengambil sampel sebanyak 10 bank. Dia berkesimpulan terdapat perbedaan yang signifikan atas kinerja bank sebelum dan sesudah krisis, karena pada dua kali pengamatan, empat rasio CAMEL yang digunakan dalam penelitiannya menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Payamta dan Machfoedz (1999) menguji kinerja bank yang *go public* sebelum dan sesudah IPO dengan menggunakan rasio CAMEL. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja yang signifikan meskipun rasio CAR, RORA, CML memberi indikasi adanya perbedaan kinerja yang signifikan untuk tahun sebelum dan sesudah IPO, namun perbedaan tersebut sifatnya temporer dan tidak konsisten.

Penelitian lain dilakukan oleh Beaver dan Payamta (1998) dalam Ahmad (2001), dia menggunakan rasio-rasio keuangan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan, diantaranya : *Cash Flow to Total Debt Ratio*, *Net Income to Total Assets Ratio*, *Current Asset to Current Liabilities Ratio*, *Total Debt to Total Assets Ratio*, dan *Working Capital to Total Asset Ratio*. Hasil studinya menunjukkan bahwa : diantara rasio keuangan yang digunakan, *Total Debt to Total Ratio* merupakan rasio yang paling sesuai diterapkan dalam menganalisa kebangkrutan bank dan *Current Assets to Current Liabilities Ratio* merupakan rasio yang kurang efektif dalam analisa kebangkrutan bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Sigit Mustiarbudi (2001) meneliti tentang tingkat kesehatan bank umum sebelum dan sesudah program rekapitalisasi. Dia menggunakan metode CAMEL dalam analisis datanya dengan rasio-rasio yang digunakan adalah CAR, RORA, NIM, CRR, ROA, BOPO, dan LDR. Dari



penelitiannya, dia berkesimpulan bahwa rasio CAMEL yang diproksikan menunjukkan perbedaan yang signifikan atas tingkat kesehatan bank antara sebelum dan sesudah program rekapitalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan tingkat kesehatan bank setelah adanya program rekapitalisasi.

Penelitian mengenai kinerja perbankan juga dilakukan oleh Harjati (2000), dia meneliti kinerja perbankan pada bank umum untuk periode sebelum dan sesudah *Initial Public Offering* (IPO) dengan 10 sampel bank. Metode yang digunakan adalah metode CAMEL dengan rasio-rasio yang digunakan adalah CAR, RORA, NPM, ROA, Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional, rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar, dan rasio kredit terhadap dana yang diterima. Dari hasil penelitiannya, dia berkesimpulan tidak ada peningkatan kinerja pada bank-bank yang *go public*, bahkan pada beberapa bank mengalami penurunan pada rasio CAMEL. Dengan demikian secara fundamental perbankan Indonesia manajemennya tidak bagus.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Perbankan**

#### **a. Pengertian Bank**

Bank sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian khususnya sektor moneter, yaitu memberikan bantuan perkreditan dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Suyatno, dkk (1997:1), definisi perbankan dikelompokkan menjadi tiga dilihat dari fungsi bank, yaitu:

1). Bank dilihat sebagai penerima kredit

Dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan, deposito berjangka, dan simpanan dalam bentuk rekening koran/ giro. Pada pengertian ini bank melakukan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun dana dari pihak ketiga.

2) Bank dilihat sebagai pemberi kredit

Dalam hal ini bank melakukan operasi perkreditan secara aktif, dimana fungsi utama bank adalah sebagai pemberi kredit, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

3). Bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.

Menurut Susilo, dkk (2000:6) secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat sedangkan secara spesifik fungsi bank adalah sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*. Sebagai *agent of trust*, kegiatan perbankan dilandasi oleh rasa saling percaya antara bank dengan nasabahnya. Bank percaya bahwa debitur akan menggunakan dana kreditnya untuk aktivitas bisnisnya dan mampu mengembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sedangkan masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank atau hilang karena bank bangkrut. Sebagai *agent of development*, bank merupakan instrumen moneter untuk ikut andil dalam menggerakkan sektor riil antara lain investasi, distribusi, dan konsumsi. Kelancaran kegiatan investasi - distribusi - konsumsi akan menciptakan lancarnya kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. Sebagai *agent of service*, disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga berfungsi sebagai pemberi jasa-jasa perbankan yang lain berupa jasa bank garansi, transfer, referensi, ATM, penyimpanan barang berharga (*Safe Deposit Boxes*), dan lain-lain.

Sedangkan menurut Sinungan dalam Mustiarbudi (2001), yang dimaksud bank adalah suatu lembaga keuangan, yaitu suatu badan yang berfungsi sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Selain itu, bank juga berperan dalam memberikan kredit dari jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

#### **b. Peranan Bank**

Menurut Susilo, dkk (2000:8), bank mempunyai peranan yang penting dalam sistem keuangan, antara lain pengalihan aset, transaksi, likuiditas, dan efisiensi.

##### 1). Pengalihan aset (*asset transmutation*)

Dalam hal ini bank berperan sebagai pengalih aset dari *lenders* ke *borrowers*. Dalam artian bank menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana (*lenders*) yang kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana (*borrowers*) dalam bentuk pinjaman. Selain itu, pengalihan aset dapat terjadi jika bank menerbitkan sekuritas sekunder (giro, deposito, tabungan) yang kemudian dibeli oleh unit surplus, selanjutnya ditukarkan dengan sekuritas primer (saham, obligasi, promes, *comercial paper*, dan lain-lain) yang diterbitkan oleh unit defisit.

##### 2). Transaksi (*transaction*)

Bank memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi dalam bentuk transaksi barang dan jasanya antara lain giro (cek, bilyet giro), sertifikat deposito, transfer, inkaso, dan lain-lain yang merupakan pengganti uang kartal untuk alat pembayaran.

##### 3). Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya, dimana produk-produk tersebut memiliki tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk

kepentingan likuiditas pemilik dan, mereka dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

4). Efisiensi (*eficiency*)

Bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya, dimana bank berperan sebagai lembaga yang mempertemukan pemilik dan pengguna modal, yaitu dengan menyediakan fasilitas informasi bisnis bagi dunia usaha sehingga tercapai efisiensi dan terhindarnya *high cost economy*.

**c. Jenis Bank**

Menurut Suyatno, dkk (1997:15), bank dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu dilihat dari fungsinya, dari segi pemiliknya dan dari segi penciptaan uang giral.

1) Dilihat dari Segi Fungsinya

- a) Bank Sentral (*Central Bank*) ialah Bank Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang dasar 1945 dan Undang-undang No. 13 tahun 1968.
- b) Bank Umum (*Commercial Bank*) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
- c) Bank Tabungan (*Saving Bank*) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
- d) Bank Pembangunan (*Development Bank*) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.
- e) Bank Desa (*Rural Bank*) ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi, jagung dan sebagainya) dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan pedesaan

2) Dilihat dari Segi Pemiliknya

- a) Bank-bank milik negara ialah bank-bank yang pendiriannya dilakukan oleh pemerintah dan atau modalnya dimiliki negara. Terdiri dari Bank Indonesia (Bank Sentral), Bank-bank Umum Milik Negara (BNI 1946, BDN, BBD, BRI, Bank Eksim), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo).
- b) Bank milik pemerintah daerah adalah bank-bank pembangunan daerah yang terdapat pada tiap daerah tingkat I dan II.
- c) Bank-bank milik swasta, terdiri dari :
  - Bank-bank milik swasta nasional, yaitu bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan-badan hukum yang pesertanya dan pemimpinnya terdiri atas warga negara Indonesia.
  - Bank-bank milik swasta asing adalah bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara asing.
  - Kerja sama antara bank swasta nasional dengan swasta asing
- d) Bank Koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan-perkumpulan koperasi.

3) Dilihat dari Segi Penciptaan Uang Giral

- a) Bank Primer adalah bank yang dapat menciptakan uang giral.
- b) Bank Sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit.

4) Jenis Bank Berdasarkan UU No.10 tahun 1998

Menurut UU No.10 tahun 1998, sesuai jenis kegiatan usahanya, bank dapat digolongkan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

- a) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Termasuk dalam kelompok ini adalah Bank Pembangunan Daerah, Bank Pemerintah, dan Bank Syariah.

- b) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayarannya.

### 2.2.2 Program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

#### a. Pengertian BLBI

Berdasarkan kamus perbankan, yang dimaksud Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah bantuan yang diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam operasinya sehari-hari, kesulitan likuiditas ini dapat terjadi antara lain, karena penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah sebagai dampak dari berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan. Sedangkan, menurut Djiwandono (1999) yang dimaksud BLBI adalah fasilitas dari Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan agar jangan terganggu karena ketidakseimbangan (*mismatch*) antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

#### b. Kondisi Ekonomi yang Melatarbelakangi BLBI

Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat sebelum tahun 1997. Kurs rupiah cenderung stabil dan investasi asing terus meningkat. Stabilitasnya nilai rupiah membuat para peminjam merasa tak perlu melindungi nilai uang mereka terhadap mata uang asing (*hedging*). Namun setelah krisis moneter melanda Indonesia pada pertengahan 1997, tidak adanya *hedging* telah membawa musibah dengan terdepresiasinya nilai tukar rupiah.

Dimensi melorotnya nilai tukar rupiah pada kuartal ketiga tahun 1997 telah menimbulkan dampak yang besar terhadap kondisi perekonomian Indonesia (sektor perbankan dan sektor riil). Hal ini diperparah dengan tidak stabilnya



situasi sosial dan politik negara pada saat itu, sehingga mengakibatkan krisis yang melanda Indonesia tidak dapat dipulihkan dengan segera, bahkan kondisinya semakin parah. Sebagaimana telah disinggung pada bab terdahulu, bahwa setidaknya ada 3 (tiga) titik lemah perekonomian Indonesia yang telah mengakibatkan krisis ekonomi berkepanjangan, yaitu : kondisi moneter yang tidak stabil, kondisi perbankan yang lemah, dan kondisi dunia usaha yang dibebani masalah hutang.

Merosotnya nilai tukar rupiah dan parahnya krisis ekonomi telah berimbas pada dunia perbankan, pada saat itu banyak bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan bahkan ada yang sudah pada tahap *insolvent*. Kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank nasional sedikit demi sedikit terkikis, hal ini semakin diperparah dengan dilikuidasinya 16 bank pada tanggal 1 November 1997 yang sebetulnya dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap bank, namun ternyata mengakibatkan keadaan yang sebaliknya. Kekhawatiran akan terjadinya likuidasi bank tahap 2 (dua) dan tidak adanya program penjaminan simpanan telah menyebabkan kepanikan masyarakat atas keamanan dananya di perbankan. Hal ini mendorong masyarakat melakukan penarikan dananya di bank secara besar-besaran (*rush*) dan memindahkan simpanannya dari bank yang dianggap kurang sehat ke bank lain yang dianggap lebih sehat.

Kepanikan masyarakat tersebut menyebabkan tekanan berat terhadap likuiditas perbankan. Beberapa bank yang sebelumnya tergolong sehat dan merupakan pemasok dana juga terkena imbasnya, sehingga berubah posisinya sebagai peminjam dana dipasar uang antar bank. Akibatnya, hampir seluruh bank umum nasional menghadapi kesulitan likuiditas dalam jumlah besar sehingga menyebabkan sebagian bank melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) dan mengalami saldo negatif atas rekening gironya di BI.

Menurut Bank Indonesia (2000) , dalam keadaan kesulitan likuiditas bank-bank yang bersifat sistematis ini pemerintah dihadapkan pada dua opsi yang dilematis, yaitu :

- 1) Menutup sejumlah bank atau melakukan stop kliring terhadap bank-bank yang kesulitan likuiditas dengan konsekuensi menimbulkan kepanikan deposan, kelumpuhan seluruh sistem perbankan, kekacuan lalu lintas pembayaran, dan kemandekan seluruh kegiatan ekonomi nasional.
- 2) Menyelamatkan bank melalui pemberian bantuan likuiditas perbankan guna mencegah lumpuhnya system perbankan, namun dapat menimbulkan *moral hazard*.

Menurut Djiwandono (1999), data statistik menunjukkan bahwa pangsa bank-bank yang seharusnya dikenakan sanksi stop kliring mencapai 55,2% dari total seluruh industri perbankan. Bahaya efek domino yang dapat terjadi, jika stop kliring tetap dilakukan adalah tidak terbayarnya tagihan antar bank yang mencapai sekitar Rp 29,4 triliun yang pada gilirannya akan menimbulkan dampak negatif bagi bank-bank pemilik tagihan. Di sektor riil, stop kliring akan memutus sebagian besar sistem pembayaran sehingga lalu lintas perdagangan akan terhenti. Selain itu, opsi penutupan bank akan menimbulkan biaya sekitar Rp 395 triliun dan menimbulkan gejolak sosial sebagai akibat kepanikan masyarakat. Sedangkan untuk bantuan likuiditas (BLBI) sampai tanggal 29 Januari 1999 hanya mencapai Rp 144,53 triliun, tentunya masih lebih kecil daripada biaya yang harus dikeluarkan jika kebijakan stop kliring dilakukan. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa situasi yang dihadapi bank-bank pada waktu itu adalah *illikuid* bukan *insolvent* sehingga mencerminkan bahwa dalam kondisi *rush*, bank yang sehat pun tidak akan mampu mengatasi kesulitan likuiditas tanpa bantuan pemerintah.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka ditetapkanlah kebijakan BLBI sebagai upaya menyelamatkan bank-bank yang kesulitan likuiditas.

### c. Landasan Hukum BLBI

Menurut Djiwandono (1999), Program BLBI memiliki landasan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dalam pasal dalam pasal 29 ayat (1) dan pasal 32 ayat (3) serta Penjelasan Umumnya

menyebutkan bahwa sebagai lender of last resort Bank Sentral dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dihadapi dalam keadaan darurat.

- 2) Pasal 37 ayat (2) huruf B Undang-Undang No 7 tahun 1992 yang mengatakan bahwa “Dalam suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- 3) Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden no 120 tahun 1998 yang mengatakan “Bank Indonesia dapat memberikan jaminan atas pinjaman luar negeri dan atau atas pembiayaan perdagangan internasional yang dilakukan oleh bank”.
- 4) Pasal 1 Keputusan Presiden no 26 tahun 1998 yang mengatakan “Pemerintah memberikan jaminan atas kewajiban pembayaran bank umum kepada pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi”.
- 5) Petunjuk-petunjuk dan Keputusan Presiden pada Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekku Wasbang dan prodis pada tanggal 3 September 1997 yang mengatakan “Krisis di beberapa Negara menunjukkan bahwa sektor keuangan –khususnya perbankan- merupakan unsur yang sangat penting dan dapat menjadi pemicu serta memperburuk keadaan. Untuk itu kepada Saudara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia saya meminta untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
  - a) Bank-bank nasional yang sehat tetapi mengalami kesulitan likuiditas untuk sementara supaya dibantu.
  - b) Bank-bank yang nyata-nyata tidak sehat, supaya diupayakan penggabungan atau akuisisi dengan bank-bank lainnya yang sehat. Jika upaya itu tidak berhasil, supaya dilikuidasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengamankan semaksimal mungkin para deposan, terutama para deposan kecil.

#### d. Status Bank Penerima BLBI

Bank-bank penerima dana BLBI dibedakan dalam empat kelompok/status, yaitu :

##### 1). Bank Dalam Likuidasi (BDL)

Menurut kamus perbankan yang dimaksud dengan Bank Dalam Likuidasi (BDL) adalah bank yang telah dicabut izin usahanya karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.68 tahun 1996 tentang ketentuan dan tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank karena dianggap tidak mungkin diselamatkan lagi meskipun telah dilakukan berbagai upaya penyehatan (*liquidated bank*).

##### 2). Bank Terambil Alih/Bank Take Over (BTO)

Bank Take Over (BTO) adalah bank yang manajemennya diambil alih oleh BPPN dengan menunjuk bank pendamping karena rasio modal (CAR) kurang dari persentase yang ditetapkan oleh BI, telah memperoleh BLBI lebih dari jumlah tertentu dan kesehatannya tergolong tidak sehat, bank tersebut beroperasi dengan pembatasan tertentu.

##### 3). Bank Beku Operasi (BBO)

Bank Beku Operasi (BBO) adalah bank yang dihentikan sementara kegiatan operasinya oleh pemerintah karena dianggap tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga (*suspension*).

##### 4). Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)

Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) adalah bank yang pada prinsipnya mengalami pembekuan atas sebagian kegiatan operasinya.

#### e. Jenis BLBI

BLBI yang merupakan bantuan likuiditas bagi bank-bank yang kekurangan likuiditas, dalam penyalurannya dibagi dalam 5 (lima) bentuk utama (Bank

Indonesia, 2002:21), yang terdiri dari saldo giro negatif, fasilitas diskonto I, fasilitas diskonto I repo, fasilitas diskonto II, serta SBPU khusus.

### 1). Saldo Giro Negatif

Terjadinya saldo giro negatif (saldo negatif) rekening bank-bank di Bank Indonesia, sebagian karena kekalahan kliring dalam perhitungan kliring. Sebagaimana diketahui, kliring merupakan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, atas nama bank maupun nasabah, yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Jika kalah kliring itu dalam jumlah yang lebih besar dari saldo kreditnya pada rekening gironya di Bank Indonesia, maka rekening giro bank tersebut menjadi negatif (*overdraft*). Dan apabila rekening giro negatifnya tidak dapat ditutup oleh bank, maka bank tersebut untuk sementara dihentikan sebagai peserta kliring. Pada masa krisis ekonomi banyak bank yang mengalami saldo negatif pada rekening gironya di BI, namun tindakan skors kliring tidak dilakukan oleh BI karena dikhawatirkan berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat pada perbankan. Atas dasar hal tersebut BI memperkenankan bank-bank bersaldo negatif dibolehkan ikut serta dalam kliring.

### 2). Fasilitas Diskonto I (Fasdis I) dan Fasilitas Diskonto I Repo (Fasdis I Repo)

#### a) Fasdis I

Fasdis I merupakan bantuan likuiditas berjangka waktu dua hari, dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing selama satu hari. Batas maksimum Fasdis I adalah 5% dari dana pihak ketiga (DPK) dalam rupiah, dengan tingkat diskonto dasar yang ditetapkan atas dasar suku bunga pasar uang. Fasilitas tersebut tidak berlaku lagi sejak 6 Maret 1998.

#### b) Fasdis I Repo

Fasilitas ini diberikan untuk membantu bank sehat yang memiliki Sertifikat Bank Indonesia, tetapi mengalami masalah likuiditas akibat krisis moneter sehingga melanggar ketentuan GWM, dan bersaldo giro

negatif. Jaminan yang diberikan dalam bentuk promes atau wesel yang telah disahkan bank lain.

### 3) Fasilitas Diskonto II (Fasdis II)

Fasdis II merupakan bantuan likuiditas berjangka waktu 90 hari, dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali masing-masing 30 hari. Batas maksimum Fasdis II adalah 3% dari dana pihak ketiga dalam rupiah.

### 4) SBPU Khusus

SBPU Khusus merupakan pengalihan dari saldo giro negatif, Fasdis I, Fasdis I repo, dan Fasdis II. Fasilitas ini didudukkan dengan suatu perjanjian berupa akta jual beli promes nasabah yang dibuat secara notariil, dengan menyerahkan jaminan yang diikat secara notariil. Bantuan ini hanya diberikan dengan jangka waktu 3 – 18 bulan, dengan tingkat diskonto 27% pertahun yang dibebankan dimuka.

**Tabel 2.1 :Jumlah Fasilitas SBPU Khusus  
(saat pengikatan untuk 28 bank)**

NO.	Jenis	Nilai (Rp)
1.	Saldo Giro Negatif	20.919.669.781.332,40
2.	Saldo Fasilitas Diskonto I	1.659.244.412.168,96
3.	Saldo Fasilitas Diskonta II	6.900.212.620.764,38
4.	Diskonto SBPU Khusus 27%	7.027.887.375.004,32
Jumlah		36.507.014.189.300,00
Fasilitas SBPU Khusus 22 bank untuk posisi 29 Januari 1999 yang dialihkan kepada pemerintah secara cessei		28.231.483.144.564,50

Sumber : Bank Indonesia

### 5) Fasilitas Diskonto

Fasdis diberlakukan sejak 6 Maret 1998, untuk menutup pelanggaran giro wajib minimum, atau untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya saldo giro

negatif. Dalam hal jumlah fasdis belum melampaui modalnya, maka bank dikenai tiga kewajiban :

- a) Disyaratkan menyusun rencana pengikatan dalam waktu yang ditentukan termasuk rencana pelunasannya.
- b) Dilarang melaksanakan pembagian deviden tunai.
- c) Dilarang memberikan kredit baru kepada pihak terkait.

Bila fasilitas diskonto yang diterima sudah melebihi modal, namun belum mencapai dua kalinya, bank tetap dikenai tiga persyaratan di atas. Selain itu, Bank Indonesia dapat mengambil alih manajemen bank.

#### **6) Fasilitas Dana Talangan untuk Pembayaran Kewajiban Luar Negri Bank dalam *Rangka Trade Finance* dan *Inter Bank Debt Arrea***

Akibat krisis ekonomi dan moneter, kepercayaan internasional terhadap perbankan nasional semakin memburuk. *Letter of Credit* (L/C) terbitan perbankan lokal tak dapat diterima oleh perbankan internasional. Ini membuat impor, khususnya kebutuhan bahan baku, obat-obatan, dan makanan, tak dapat berjalan.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah bernegosiasi dengan perbankan internasional. Hasilnya adalah kesepakatan Frankfurt, 4 Juni 1998. dalam pertemuan ini disepakati bahwa pemerintah akan membayar kewajiban perbankan nasional dalam rangka *trade finance* kepada kreditur luar negri. Pemerintah juga menalangi lebih dulu kewajiban bank-bank lokal terhadap bank luar negri yang telah jatuh tempo.

- a) Fasilitas dana talangan untuk pembayaran kewajiban luar negri bank dalam rangka *trade finance*

Pemerintah akan menjamin kewajiban perbankan nasional dalam rangka *trade finance* kepada bank kreditur luar negri. Dasar jaminan pembiayaan perdagangan internasional oleh Bank Indonesia adalah *letter of guaranty* (LOG) terbitan Bank Indonesia kepada bank kreditur luar negri yang menyediakan kredit.

- b) Fasilitas dana talangan untuk pembayaran kewajiban luar negeri bank dalam rangka *interbank debt arrears*

Pemerintah menalangi kewajiban bank-bank dalam negeri yang telah jatuh tempo namun tak bisa dibayar (*arrears*) terhadap bank-bank luar negeri, atas transaksi pembiayaan perdagangan (*trade finance*) dan pinjaman luar negeri antar bank (*interbank debt*) dengan posisi sampai 30 Juni 1998. Fasilitas ini diluncurkan sebagai syarat agar bank kreditur luar negeri membuka kembali *credit line*-nya kepada perbankan lokal.

#### 7) Fasilitas Dana Talangan Rupiah untuk Bank-bank yang Dilikuidasi

Pada 1 November 1997, pemerintah melikuidasi 16 bank *insolvent*. Penyediaan dana talangan ditujukan untuk memelihara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Pembayaran dana nasabah dilaksanakan dalam dua tahap.

- a) Tahap pertama untuk pembayaran semua penabung, deposan, dan giran, sampai Rp 20 juta per rekening. Dana talang rupiah I adalah sebesar Rp 1.624.280.000.000.
- b) Tahap kedua untuk membayar sisa dana nasabah ditalangi lebih dulu oleh Bank Indonesia, selanjutnya dibebankan ke APBN selama 10 tahun.

**Tabel 2.2 Fasilitas Dana Talangan Valas yang Dialihkan Kepada Pemerintah (Posisi tanggal 29 Januari 1999)**

No	Dialihkan	Nilai (Rp Triliun)
1	Kepada Bank 5 BBO	5,399
2	Kepada Bank 3 BTO	1,626
3	Kepada bank 5 BBKU	1,443
4	Kepada Bank 3 BDL	0,392
Jumlah		9,270

Sumber : Bank Indonesia

Keterangan : BBO : Bank Beku Operasi  
BTO : Bank Take Over



BBKU : Bank Beku Kegiatan Usaha

BDL : Bank Dalam Likuidiasi

**Tabel 2.3 Fasilitas Dana Talangan Rupiah yang Dialihkan Secara Cessie  
(Per posisi 29 Januari 1999)**

No	Dialihkan	Nilai (Rp)
1	Kredit talangan tahap I dan II Bank Dalam Likuidasi	5.335.003.344.835,81
2	Tagihan kepada bank yang dilkuidasi karena saldo giro negatif	6.161.003.686.246,47
Jumlah		11.496.007.031.082,30

Sumber : Bank Indonesia

#### 8) Fasilitas Saldo Debet

Untuk memperkuat posisi serta mengamankan kepentingan Bank Indonesia terhadap bank-bank yang setelah tanggal 1 Januari 1998 masih bersaldo giro negatif, saldo giro minus tersebut mulai Agustus 1998 didudukkan menjadi fasilitas saldo debet, diikuti pembuatan akta notariil berupa akta pengakuan hutang (APH), dan akta pengakuan hutang dengan pemberian jaminan (APHJ).

Berikut ini adalah daftar nama bank-bank penerima BLBI dan besarnya jumlah dana BLBI yang diterima :

**Tabel 2.4 Nama bank bank penerima BLBI beserta jumlah dana BLBI yang diterima**

Nama Bank	Jumlah
<b>Bank Dalam Likuidasi (BDL)</b>	
1. Bank Umum Majapahit	8.554.789.643
2. South East Asia Bank	899.399.023.306
3. Bank Jakarta	210.994.000.000
4. Bank Mataram	336.763.209.867
5. Bank Kosagraha Sejahtera	201.812.714.291
6. Bank Astria Fiaya	578.918.260.699
7. Bank Dwipa	110.105.997.131

Dilanjutkan

Lanjutan tabel 2.4

8. Bank Pinaesan	681.084.490.920
9. Bank Industri	511.470.229.327
10. Bank Anrico	210.080.728.376
11. Bank Citrahasta	201.802.166.935
12. Sejahtera Bank Umum	1.687.349.515.373
13. Bank Guna Internasional	251.055.008.000
14. Bank Harapan Sentosa	3.866.182.312.852
15. Bank Pacific	2.133.366.434.840
<b>Bank Take Over (BTO)</b>	
1. Bank PDFCI	1.995.000.000.000
2. Bank Central Asia	26.596.277.206.758
3. Bank Danamon	23.049.525.976.568
4. Bank Tiara Asia	2.978.093.092.511
<b>Bank Beku Operasi (BBO)</b>	
1. Bank Deka	152.918.237.345
2. Bank Modern	2.557.694.819.863
3. Bank Subentra	860.853.021.075
4. Bank Pelita	1.989.832.331.911
5. Bank Centris	629.624.459.127
6. Bank Hokindo	214.228.744.913
7. Bank Istismarat	520.236.370.939
8. Bank Umum Nasional	12.067.961.714.246
9. Bank Surya	1.653.836.353.167
10. BDNI	37.039.767.087.374
<b>Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)</b>	
1. Bank Lautan Berlian	240.816.707.107
2. Bank Aken	301.317.547.368
3. Bank Central Dagang	1.403.491.012.593
4. Bank Pesona (Utama)	2.334.896.340.396
5. Bank Umum Servitia	361.976.074.127
6. Bank Bira	4.018.235.975.547
7. Bank Asia Pasific	2.054.975.373.845
8. Bank Intan	401.548.130.882
9. Bank Sewu	642.246.371.029
10. Bank Dagang Industri	481.547.612.095
11. Bank Tata	221.276.272.725
12. Bank Papan Sejahtera	928.910.769.285
13. Bank Baja Internasional	35.769.415.803
14. Bank Ficorinvest	917.853.312.385
15. Bank Dewa Rutji	609.408.426.570
16. Bank Danahutama	184.817.694.158

Dilanjutkan

Lanjutan tabel 2.4

17. Bank PSP	1.938.944.815.970
18. Bank Uppindo	242.955.792.127
19. Bank Nusa Nasional	3.020.318.553.161
<b>Jumlah</b>	144.536.094.394.531

Sumber : Panja BLBI/Audit BPK dalam Kompas, 10 Maret 2000

#### f. Beda BLBI dengan KLBI

Istilah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) secara resmi baru dipergunakan oleh Bank Indonesia dalam bulan Maret 1998 dan terdiri dari semua fasilitas Bank Indonesia yang tersedia bagi perbankan diluar Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Apabila KLBI merupakan kredit Bank Indonesia yang disalurkan melalui perbankan (sebagai bank pelaksana) bagi sektor-sektor usaha yang diprioritaskan oleh pemerintah atau yang lebih dikenal dengan kredit "program", maka BLBI merupakan fasilitas "non-program" yang merupakan tanggapan atas kesulitan likuiditas bank karena penarikan dana nasabah yang tidak dapat diatasi oleh bank-bank secara individual.

Menurut Djiwandono (1999), ada dua unsur pokok perbedaan BLBI dengan KLBI, yaitu datangnya inisiatif dan suku bunga. Dari segi asal datangnya inisiatif, BLBI datang dari bank yang mengajukan permintaan bantuan kepada BI- sebagai lender of last resort- karena menghadapi masalah ketidak seimbangan likuiditas (*mismatch*) antara penerimaan dana dan pembayaran yang tidak bias ditutup dengan sumber dana lain yang lazim dalam perbankan. Sedangkan dalam KLBI inisiatif datang dari BI, yang membantu pelaksanaan program pemerintah (sebagai agent of development) memberi kredit kepada bank pelaksana agar menyalurkan kredit tersebut pada sektor atau kegiatan atau kelompok yang diprioritaskan dalam program pemerintah. KLBI digunakan untuk membiayai berbagai kredit program pemerintah yang diperuntukan untuk membiayai pengadaan pangan, kegiatan-kegiatan yang menyentuh secara langsung kepada usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dari aspek suku bunga, BLBI mempunyai suku bunga yang mengandung unsur pinalti untuk mengurangi moral hazard karena itu selalu lebih tinggi dari

pasar. Sedangkan suku bunga KLBI mengandung unsur subsidi, karena itu lebih rendah dari suku bunga pasar.

#### g. Permasalahan BLBI

Sebenarnya Bank Indonesia (BI) sebagai pelaksana program BLBI mengalami dilema yang rumit dalam awal pengambilan keputusan penyaluran dana BLBI, BI dihadapkan pada dua pilihan pelik, yaitu melakukan stop kliring terhadap bank-bank yang bersaldo negatif dengan resiko terjadi efek domino yang akan menggoncangkan sistem perbankan yang selanjutnya akan mempengaruhi stabilitas ekonomi. Sebaliknya bila saldo debit disetujui dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar yang akan mempengaruhi inflasi dan neraca pembayaran. Disinggung itu dikhawatirkan pula timbulnya "moral hazard" diperbankan. Keputusan yang diambil akhirnya adalah menyetujui saldo debit yang tertuang dalam bentuk BLBI (Prasetianto, dkk 2000:60).

Harapan awal dari pelaksanaan BLBI adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang pada saat itu mengalami penurunan. Namun, bukan harapan yang tercapai, melainkan petakalah yang harus diperoleh dari BLBI ini. Terbukti banyak bank penerima BLBI tidak selamat malahan ditutup, dampaknya muncul tambahan hutang bank ke BI yang belum diselesaikan dan pada akhirnya dialihkan (*cessie*) sebagai tagihan BI pada pemerintah (lewat BPPN) (Kompas : 9 Maret 2000).

Ditemukan banyak penyelewengan dalam pelaksanaan program BLBI yang mengakibatkan kerugian bagi negara. BPK menyatakan dari hasil audit investigasi atas penyaluran BLBI sebesar Rp 144.536.086.000.000 ditemukan penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 138.442.026.000.000 atau 96,78% dari total BLBI yang disalurkan posisi tanggal 29 Januari 1999 (Bank Indonesia : 2000).

Paling tidak ada 4 (empat) titik utama kelemahan BLBI yang telah menimbulkan permasalahan yang rumit, antara lain : dalam penyaluran , penggunaan, dan pengawasan BLBI, serta program penjaminan pemerintah.

Dalam penyaluran BLBI, prosedur penyaluran BLBI dilakukan melalui rekening giro bank-bank pelaksana yang ada di BI. Rekening itu berfungsi untuk menampung kewajiban pembayaran bank-bank pelaksana yang ada di BI yang diproses melalui kliring, akibatnya akan menghasilkan saldo debit dan saldo kredit. Saldo debit bank pelaksana terjadi karena adanya berbagai macam pembenahan yang dilakukan oleh BI dengan kondisi demikian sulit dideteksi dan dipisahkan antara pembebanan kewajiban lain dari bank pelaksana.

Selain itu ditemukan adanya banyak pelanggaran aturan hukum yang dilakukan BI dalam penyaluran BLBI ini. Menurut fersi BPK terdapat penyelewengan (pelanggaran) aturan atas ketentuan BI tentang penyaluran BLBI yang terpisah-pisah dalam bentuk Saldo Debet, Fasdis I, Fasdis II, SBPU Khusus, Fasilitas Diskonto, dan talangan valuta asing untuk mengatasi tunggakan dagang dan utang antar bank, serta talangan rupiah terhadap 16 Bank Dalam Likuidasi (BDL). Hal ini mengakibatkan BPK menyatakan tak dapat meyakini kebenaran jumlah nominal BLBI yang dapat dibebankan kepada pemerintah (Bank Indonesia, 2002:50).

Dari total penerimaan BLBI pada 48 bank penerima yaitu sebesar Rp 144.536.086 juta, telah ditemukan berbagai pelanggaran dari ketentuan yang berlaku dalam penggunaan BLBI. Berdasarkan Siaran Pers BPK – RI tentang Hasil Audit Investigasi Atas Penyaluran dan Penggunaan BLBI, penyimpangan dalam penggunaan BLBI meliputi :

- 1) BLBI digunakan untuk membayar/melunasi modal pinjaman-pinjaman subordinasi.
- 2) BLBI digunakan untuk membayar/melunasi kewajiban pembayaran bank umum yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan dokumen yang lazim untuk transaksi sejenis.
- 3) BLBI digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak terkait.
- 4) BLBI digunakan untuk transaksi surat berharga.
- 5) BLBI digunakan untuk membayar/melunasi dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan.

- 6) BLBI digunakan untuk membiayai kontrak *derivative* baru atau kerugian karena kontrak *derivative* lama yang jatuh tempo/cut loss.
- 7) BLBI digunakan untuk membiayai *placement* baru dari PUAB.
- 8) BLBI digunakan untuk membiayai ekspansi kredit atau merealisasikan kelonggaran tarik dari komitmen yang sudah ada.
- 9) BLBI digunakan untuk membiayai investasi dalam aktiva tetap, pembukaan cabang baru, rekrutmen personil baru, peluncuran produk baru, dan penggantian sistem baru.
- 10) BLBI digunakan untuk membiayai *over head* bank umum.

Dalam hal pengawasan BLBI, BPK berpendapat kinerja pengawasan bank yang dilakukan BI adalah lemah. Hal ini disebabkan oleh :

- 1) Jumlah bank dan cabang yang diawasi tak seimbang dengan banyaknya pengawas dan pemeriksa. Frekuensi pemeriksaan langsung yang seharusnya setahun sekali tidak dapat dilaksanakan.
- 2) Laporan berkala yang dijadikan penilaian kinerja dan kesehatan bank tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Banyak bank merekayasa laporannya, sehingga penilaian tingkat kesehatan bank tidak dapat objektif.

Berdasarkan hasil *due diligence* diketahui terjadi pelanggaran dan rekayasa batas maksimum pemberian kredit dalam waktu cukup lama. Namun, pelanggaran itu tek terdeteksi oleh sistem pengawasan bank yang diterapkan oleh BI (Bank Indonesia, 2002:73).

Masalah terakhir yang timbul adalah dalam hal program penjaminan pemerintah. Menurut Panja BLBI dalam Kompas : 15 Maret 2000, dalam kebijakan makro antara BI dan Menteri Keuangan harusnya ada sinergi. Tetapi dalam pelaksanaannya terlihat kurang koordinasi dan terkesan ada kesemrawutan administrasi birokrasi sehingga penyaluran BLBI menjadi bermasalah. BLBI merupakan program pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh BI selaku *lender of last resort*, jadi sudah seharusnya pemerintah melakukan penjaminan BLBI melalui BPPN yang dilakukan dalam bentuk *cessie*. Ini didasarkan pada persetujuan bersama Gubernur BI dan Merkeu tertanggal 6 Februari 1999.

BPK berpendapat bahwa ada beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan program penjaminan pemerintah, antara lain :

- 1) Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama tentang Penjaminan Pemerintah, semestinya kewajiban jatuh tempo yang tak dapat dibayar oleh bank diselsaikan melalui program tersebut. Sehingga, semua kewajiban bank yang jatuh tempo dibiarkan dibayarkan melalui proses kliring.
- 2) BI melakukan pembayaran untuk kewajiban *past due interest*. Kewajiban ini termasuk yang dapat ditalangi tanpa ada permintaan dari bank.

### 2.3.1 Penilaian Kinerja Keuangan Bank

#### a. Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan adalah hasil nyata yang dicapai, kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan dicapainya hasil yang positif (Tunggal, 1995). Kinerja juga bisa diartikan sebagai prestasi perusahaan secara keseluruhan dalam menggunakan sumber daya (*man, money, method, machine, material*) dalam perusahaan. Menurut Keputusan Menkeu RI Nomor 740/KMK.00/1989 tanggal 28 Juni 1989, yang dimaksud dengan kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut.

Penilaian kinerja perusahaan merupakan upaya untuk mengetahui prestasi yang dicapai oleh perusahaan sebagai unit usaha dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja penting dilakukan oleh manajemen, pemegang saham, dan kreditor, karena menyangkut distribusi kesejahteraan dan faktor keamanan bagi mereka, serta karyawan yang merupakan pihak yang langsung merasakan dampak dari kinerja tersebut. Penilaian kinerja keuangan perusahaan jasa perbankan dapat diketahui dari perhitungan rasio keuangan dari laporan keuangan yang disajikan . Laporan keuangan bank merupakan proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai media komunikasi antara kegiatan bank dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data/kegiatan bank. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), laporan keuangan bank terdiri dari : Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan

Perubahan Modal, dan Catata atas Laporan Keuangan. Analisis terhadap pos-pos neraca bank akan menghasilkan informasi tentang posisi keuangan bank, sedangkan analisis terhadap laporan laba/rugi menghasilkan gambaran tentang perkembangan usaha bank.

Analisis rasio keuangan adalah suatu cara atau alat untuk menilai kinerja/prestasi keuangan suatu badan usaha. Riyanto (1995:253) menyebutkan bahwa rasio akan mempunyai arti bila setidaknya dua cara terpenuhi, yaitu : a) analisis kecenderungan (*trend analysis*), yaitu membandingkan rasio-rasio sekarang dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu mendatang dari perusahaan yang sama, b) membandingkan raio-rasio dari suatu erusahaan dengan rasio dari perusahaan lain sejenis.

Weston dan Copeland (1995 : 111) mengelompokan dalam 35 rasio keuangan, akan tetapi umumnya ukuran yang lazim dipakai dalam rasio keuangan hanya 4 kategori utama, yaitu :

- 1) Rasio Keuntungan, ditujukan untuk menilai seberapa besar tingkat laba suatu perusahaan.
- 2) Rasio aktivitas, mencoba mengukur efisiensi dari kegiatan operasional perusahaan dan mencoba mengungkapkan masalah-masalah yang selama ini tersembunyi.
- 3) Rasio leverage, ditujukan untuk mengukur seberapa bagus struktur permodalan perusahaan, dan
- 4) Rasio likuiditas, mengukur seberapa likuid perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.

Muljono (1999:114) mengklasifikasikan analisis rasio keuangan bank kedalam 4 kategori, yaitu : rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban financial yang harus dipenuhi, rasio rentabilitas yaitu mengukur kemampuan bank dalam mencapai kinerja secara menyeluruh dalam mengoperasikan perusahaan, rasio solvabilitas yaitu mengukur kemampuan permodalan bank atau disebut juga sebagai *capital adequacy analysis*, rasio efisiensi yaitu untuk mengukur *performance* manajemen bank dalam



menggunakan faktor produksi secara efisien, dan rasio resiko usaha bank yaitu untuk mengukur tingkat resiko usaha bank.

**b. CAMEL (Capital Adequacy, Assets Quality, Management, Earning, dan Liquidity)**

Untuk mengukur kinerja keuangan bank diperlukan suatu alat analisis. Alat analisis ini berupa rasio-rasio keuangan yang telah lajim digunakan untuk menilai kinerja keuangan bank. Kinerja bank diproksikan dengan rasio-rasio keuangan CAMEL, yang disesuaikan dengan data yang tersedia. Kinerja bank dinilai berdasarkan aspek permodalan, Kualitas Aktiva Produktif (KAP), aspek manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Teknik CAMEL dalam penelitian ini tidak bisa diterapkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia Nomor 26/23/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan bank Umum tetapi disesuaikan dengan kecukupan data. Penyesuaian ini terpaksa dilakukan mengingat :

- 1). Sesungguhnya penilaian kinerja terhadap aspek-aspek tersebut tidak cukup hanya mendasarkan pada laporan keuangan, khususnya aspek manajemen dan KAP, dan
- 2). Beberapa studi tentang kinerja bank yang diproksikan dengan CAMEL selalu disesuaikan dengan data yang tersedia.

Dalam penelitian ini, KAP diproksikan dengan Return On Risked Assets (RORA). RORA merupakan rasio antara laba sebelum pajak dengan risked assets. RORA menunjukkan kemampuan bank dalam usaha mengoptimalkan aktiva yang dimilikinya untuk memperoleh laba. Risked assets merupakan penjumlahan antara kredit yang diberikan ditambah dengan penempatan pada surat-surat berharga. Semakin besar rasio RORA, semakin baik, karena memberikan indikasi bahwa bank yang bersangkutan mampu mengoptimalkan penggunaan aktiva yang dimilikinya. Penggunaan aktiva menjadi lebih optimal jika jumlah aktiva tersebut merupakan aktiva yang produktif.

Penyesuaian terhadap KAP dilakukan karena di Indonesia hanya bank Indonesia dan bank yang bersangkutan yang mengetahui tingkat kolektibilitasnya

(lancar, kurang lancar, diragukan, atau macet) kualitas aktiva tersebut. Selain itu aspek manajemen dalam penelitian ini tidak menggunakan pola yang ditetapkan oleh BI tetapi diproksikan dengan Profit Margin, alasannya seluruh kegiatan manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas pada akhirnya akan mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba bank tersebut. Berikut ini adalah aspek-aspek yang dianalisis dalam CAMEL, yaitu :

### 1) Aspek Permodalan

Aspek permodalan bank dinilai berdasarkan rumusan kewajiban penyediaan modal minimum (CAR), yaitu hasil bagi antara modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Modal meliputi modal inti dan modal pelengkap. Modal inti meliputi modal disetor, cadangan laba ditahan, agio saham, modal donasi, dan laba ditahan berjalan (dihitung 50% dari laba atau 100% dari rugi) tahun berjalan. Modal pelengkap meliputi cadangan ravaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan kativa produktif (minimal 1,25% dari ATMR), modal pinjaman dan modal subordinasi, serta CAR minimal 8%. ATMR adalah aktiva tertimbang menurut resiko yang mencakup aktiva neraca dan pos dalam rekening administrasi bagi bank umum, serta kativa aktiva neraca bagi BPR. Sejak bulan September 1997 bank umum devisa yang modal distornya mencapai Rp 150 milyar ditetapkan CAR sebesar 9%, sedangkan bagi bank yang jumlah modal disetornya kurang dari Rp 150 milyar dianjurkan untuk merger dengan bank lainnya agar mampu memnuhi ketentuan tersebut. Pada taun 1998, CAR ditetapkan sebesar 4% untuk bank kategori A sebab secara likuiditas perbankan di Indonesia mengalami penurunan. Rasio CAR menunjukkan kemampuan permodalan bank dalam memabayar kembali dana yang disimpan deposan.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Equity Capital} - \text{Fixed Assets}}{\text{Total Loans} + \text{Securities}} \times 100\% \quad (\text{Mulyono, 1999:113})$$

## 2) Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Merupakan penanaman dana bank yang diklasifikasikan berdasarkan mutunya, yang terdiri dari kredit, surat berharga, penanaman modal antar bank dan penyertaan. Aktiva produktif digolongkan kolektibilitasnya (tingkat kelancarannya) dengan perhitungan sebagai berikut :

- 1). Lancar : 0% x Aktiva Produktif Lancar
- 2). Dalam Perhatian Khusus : 25% x Aktiva Produktif Dalam Perhatian Khusus
- 3). Kurang Lancar : 50% x Aktiva Produktif Kurang Lancar
- 4). Diragukan : 75% x Aktiva Produktif Diragukan
- 5). Macet : 100% x Aktiva Produktif Macet

hasil perkalian tersebut dijumlahkan dan dibagi aktiva produktif. Rasio KAP (EAR) yang dianggap sehat adalah maksimum 3,35% (SE Dir BI Nomor 31/148/Kep/Dir tanggal 12 November 1998).

Rasio terhadap KAP ini digunakan untuk mengetahui resiko usaha bank dari hasil penanaman dananya. Rasio yang diprosikan untuk KAP ini adalah rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif, sedangkan aktiva produktif yang diklasifikasikan adalah aktiva produktif yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian. KAP diprosikan pada rasio RORA (*Return On Risked Assets*). RORA merupakan rasio antara Laba Sebelum Pajak (EBT) dengan Risked Asset. RORA menunjukkan kemampuan bank dalam usaha mengoptimalkan aktiva yang dimiliki untuk memperoleh laba.

$$\text{RORA} = \frac{\text{Earning Before Taxes}}{\text{Risked Assets}} \times 100\% \quad (\text{Mustiarbudi, 2001})$$

## 3) Aspek Manajemen

Penilaian terhadap faktor manajemen mencakup Manajemen Umum dan Manajemen Resiko dan data diperoleh dengan mengisi daftar 100 pertanyaan

yang terbagi menjadi : Manajemen Umum yang menyangkut hal-hal yang terkait dengan kepemimpinan, sistem, sumberdaya manusia dan budaya kerja yang semuanya diukur secara kualitatif dan Manajemen Resiko yang menyangkut *liquidity risk, market risk, credit risk, operational risk, legal risk, dan ownership and managership risk*. Aspek manajemen diproksikan pada rasio NPM (*Net Profit Margin*) dan CRR (*Credit Risk Ratio*).

NPM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan *Net Income* dari kegiatan operasi pokok bagi bank yang bersangkutan. Sedangkan CRR merupakan rasio untuk mengukur risiko bank atas kemungkinan tidak kembalinya kredit yang diberikan dari total pinjamannya.

$$\text{NPM} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Operating Income}} \times 100\% \quad (\text{Mulyono, 1999:132})$$

$$\text{Credit Risk Ratio} = \frac{\text{Bad Det (PPAP)}}{\text{Total Loan}} \times 100\% \quad (\text{Mulyono, 1999:101})$$

#### 4) Aspek Rentabilitas

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, penilaian terhadap rentabilitas dibagi menjadi dua rasio, yaitu Return On Assets (ROA) serta Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dalam periode yang sama. *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio untuk mengetahui kemampuan bank menghasilkan laba secara relatif dibandingkan dengan total assetnya (volume) kriteria sehat untuk ROA adalah 1,215%. Sedangkan BOPO merupakan rasio untuk mengetahui prosentase perbandingan antara biaya operasional (biaya usaha dan biaya operasional lainnya) dengan pendapatan operasional. Kriteria untuk rasio BOPO maksimum 93,52%.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Earning Before Taxes}}{\text{Total Assets}} \times 100\% \quad (\text{Mulyono, 1999: 134})$$

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \quad (\text{Mustiarbudi, 2001})$$

### 5) Aspek Likuiditas

Analisa likuiditas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank untuk mampu membayar hutang-hutang dan membayar kembali kepada deposannya serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Penilaian terhadap faktor likuiditas ini didasarkan pada rasio Kredit yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima (rupiah dan valas) atau biasa disebut *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio untuk mengetahui besarnya penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposit masyarakat, dimana semakin besar rasionya maka akan semakin besar resiko yang ditanggung bank. Resiko akan efektif timbul jika kredit yang disalurkan mengalami masalah atau kemacetan. Berdasarkan ketentuan BI maka LDR dibatasi maksimal hanya sampai dengan 94,75% dan pengertian deposit termasuk didalamnya unsure modal sendiri.

$$\text{LDR} = \frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\% \quad (\text{Mulyono, 1999:101})$$

### 2.3 Hipotesis

- Ho : Tidak terdapat perbedaan kinerja perbankan sebelum dan sesudah program penyaluran dana BLBI.
- Ha : Terdapat perbedaan kinerja perbankan sebelum dan sesudah program penyaluran dana BLBI.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### 3.1 Obyek dan Periode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kasus terhadap 3 (tiga) bank dari total 48 bank penerima BLBI, yaitu Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, dan Bank Tiara Asia. Studi kasus dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa hanya ketiga bank tersebut di atas yang tersedia laporan keuangan tahunannya sampai tahun 1999 dan ketiga bank tersebut merupakan bank penerima BLBI dengan kapitalisasi terbesar sehingga layak dijadikan obyek penelitian ini. Adapun periode penelitian ini adalah dari tahun 1996 sampai tahun 1999 yang terbagi dalam dua bagian, yaitu :

- 1). 2 tahun sebelum penyaluran dana BLBI (1996 dan 1997).
- 2). 2 tahun sesudah penyaluran dana BLBI (1998 dan 1999).

Pada tahun 2000 pemerintah bersama dengan Bank Indonesia telah menjalankan program rekapitalisasi perbankan dan ketiga bank sampel juga masuk dalam program itu. Jika periode penelitian ini ditambah melebihi tahun 1999 dikhawatirkan akan menimbulkan bias pada hasil penelitian ini.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah bank-bank penerima dana bantuan BLBI. Pada awal pemberian dana BLBI terdapat 48 bank yang menerima dana BLBI yang terbagi dalam 4 kategori, yaitu : Bank Dalam Likuidasi (BDL), Bank Take Over (BTO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), dan Bank Beku Operasi (BBO). Dari keempat kategori diatas hanya bank dalam kategori BTO saja yang masih tersedia laporan keuangannya hingga tahun 1999, diantaranya Bank Central Asia, Bank Tiara Asia, dan Bank Danamon. Berdasarkan pertimbangan itulah, maka yang dijadikan sampel dari penelitian ini adalah Bank BCA, Bank Danamon, dan Bank Tiara Asia dalam bentuk studi kasus. Berikut adalah daftar nama bank penerima dana BLBI beserta ketersediaan laporan keuangan tahunannya hingga tahun 1999.



Tabel 3.1 Daftar nama bank-bank penerima dana BLBI

Bank Penerima Dana BLBI	Laporan Keuangan
<b>Bank Dalam Likuidasi (BDL)</b>	
1. Bank Umum Majapahit	Tidak tersedia
2. South East Asia Bank	Tidak tersedia
3. Bank Jakarta	Tidak tersedia
4. Bank Mataram	Tidak tersedia
5. Bank Kosagraha Sejahtera	Tidak tersedia
6. Bank Astria Fiaya	Tidak tersedia
7. Bank Dwipa	Tidak tersedia
8. Bank Pinaesan	Tidak tersedia
9. Bank Industri	Tidak tersedia
10. Bank Anrico	Tidak tersedia
11. Bank Citrahasta	Tidak tersedia
12. Sejahtera Bank Umum	Tidak tersedia
13. Bank Guna Internasional	Tidak tersedia
14. Bank Harapan Sentosa	Tidak tersedia
15. Bank Pacific	Tidak tersedia
<b>Bank Take Over (BTO)</b>	
1. Bank PDFCI	Tidak tersedia
2. Bank Central Asia	Tersedia
3. Bank Danamon	Tersedia
4. Bank Tiara Asia	Tersedia
<b>Bank Beku Operasi (BBO)</b>	
1. Bank Deka	Tidak tersedia
2. Bank Modern	Tidak tersedia
3. Bank Subentra	Tidak tersedia
4. Bank Pelita	Tidak tersedia
5. Bank Centris	Tidak tersedia
6. Bank Hokindo	Tidak tersedia
7. Bank Istismarat	Tidak tersedia
8. Bank Umum Nasional	Tidak tersedia
9. Bank Surya	Tidak tersedia
10. BDNI	Tidak tersedia
<b>Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)</b>	
1. Bank Lautan Berlian	Tidak tersedia
2. Bank Aken	Tidak tersedia
3. Bank Central Dagang	Tidak tersedia
4. Bank Pesona (Utama)	Tidak tersedia
5. Bank Umum Servitia	Tidak tersedia
6. Bank Bira	Tidak tersedia
7. Bank Asia Pasific	Tidak tersedia

Di lanjutkan

Lanjutan tabel 3.1

8. Bank Intan	Tidak tersedia
9. Bank Sewu	Tidak tersedia
10. Bank Dagang Industri	Tidak tersedia
11. Bank Tata	Tidak tersedia
12. Bank Papan Sejahtera	Tidak tersedia
13. Bank Baja Internasional	Tidak tersedia
10. Bank Dagang Industri	Tidak tersedia
11. Bank Tata	Tidak tersedia
12. Bank Papan Sejahtera	Tidak tersedia
13. Bank Baja Internasional	Tidak tersedia
14. Bank Ficorinvest	Tidak tersedia
15. Bank Dewa Rutji	Tidak tersedia
16. Bank Danahutama	Tidak tersedia
17. Bank PSP	Tidak tersedia
18. Bank Uppindo	Tidak tersedia
19. Bank Nusa Nasional	Tidak tersedia

Sumber : Panja BLBI/Audit BPK dalam Kompas, 10 Maret 2000

### 3.3 Identifikasi Variabel

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka variabel penelitian ini terdiri dari :

- 1). Permodalan
  - a. CAR (*Capital Adequacy Ratio*)
- 2). KAP (Kualitas Aktiva Prduktif)
  - a. RORA (*Return On Risked Assets*)
- 3). Manajemen
  - a. NPM (*Net Profit Margin*)
  - b. CRR (*Credit Risk Assets*)
- 4). Rentabilitas
  - a. ROA (*Return On Assets*)
  - b. BOPO (*Biaya Operasional Pendapatan Operasional*)
- 5). Likuiditas
  - a. LDR (*Loan to Deposits Ratio*)



### 3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Operasional variabel penelitian ini adalah rasio-rasio CAMEL yang memproksikan kinerja bank. Berikut adalah definisi operasional variabel beserta pengukurannya.

- a. CAR (*Capital Adequacy Ratio*) (Mulyono, 1999: 113)

Rasio ini untuk menunjukkan kemampuan permodalan bank dalam memabayar kembali dana yang disimpan deposan. Sesuai dengan ketentuan BI sesuai Surat Edaran Direksi Nomor 31/147/Kep/Dir tanggal 12 November 1998, CAR bagi bank-bank di Indonesia sekurang-kurangnya sebesar 8 %.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Equity Capital} - \text{Fixed Assets}}{\text{Total Loans} + \text{Securities}} \times 100\%$$

- b. RORA (*Return On Risked Assets*) (Mustiarbudi, 2001: 44)

Merupakan rasio antara Laba Sebelum Pajak (EBT) dengan Risked Asset yang merupakan proksi dari Kualitas Aktiva Produktif (KAP). RORA menunjukkan kemampuan bank dalam usaha mengoptimalkan aktiva yang dimiliki untuk memeproleh laba.

$$\text{RORA} = \frac{\text{Earning Before Taxes}}{\text{Risked Assets}} \times 100\%$$

- c. NPM (*Net Profit Margin*) (Mulyono, 1999: 132)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan Net Income dari kegiatan operasi pokok bagi bank yang bersangkutan. NPM merupakan rasio proksi dari aspek manajemen.

$$\text{NPM} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

d. *Credit Risk Ratio* (Mulyono, 1999: 101)

Aspek manajemen diproksikan dengan *Credit Risk Ratio* yang merupakan rasio untuk mengukur risiko bank atas kemungkinan tidak kembalinya kredit yang diberikan dari total pinjamannya.

$$\text{Credit Risk Ratio} = \frac{\text{Bad Det (PPAP)}}{\text{Total Loan}} \times 100\%$$

- e. Rasio laba Sebelum pajak terhadap Volume Usaha dan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Aspek Earning atau rentabilitas diproksikan dengan rasio tersebut yaitu dengan rumus :

$$1) \text{ ROA} = \frac{\text{Earning Before Taxes}}{\text{Total Assets}} \times 100\% \quad (\text{Mulyono, 1999: 134})$$

$$2) \text{ BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \quad (\text{Mustiarbudi, 2001: 45})$$

f. *LDR (Loan to Deposit Ratio)* (Mulyono, 1999: 101)

LDR merupakan rasio kredit/pinjaman yang diberikan terhadap deposit/dana yang diterima, yang terdiri dari KLBI, giro, deposito, tabungan, pinjaman bukan bank dengan jangka lebih dari 3 bulan, deposito dan pinjaman lain lebih dari 3 bulan, surat berharga bank jangka lebih dari 3 bulan, modal inti dan modal pinjaman, rasio yang ideal antara 85% sampai dengan 95%.

$$\text{LDR} = \frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

### 3.5 Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan bank penerima BLBI yang tersedia di Bank Indonesia, *Bank Market Directory*, Harian Kompas, dan sumber data lain yang

relevan. Laporan keuangan bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 2 tahun sebelum menerima BLBI (1996 dan 1997) dan 2 tahun sesudah penyaluran dana BLBI (1998 dan 1999). Sedangkan data yang terkumpul dihimpun dengan metode dokumentasi, yaitu melakukan pencatatan atas data-data maupun catatan-catatan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 3.6 Teknik Analisa Data

Rasio-rasio CAMEL yang diperoleh dari perhitungan kemudian dianalisa menggunakan uji t dua sisi (*two tailed test*). Uji t dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kinerja keuangan bank yang signifikan antara sebelum dan sesudah penyaluran dana BLBI. Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji t dua sisi adalah sebagai berikut :

1. Membuat formulasi uji hipotesis :

$H_0$  :  $\mu_{\text{CAMEL}}$  sebelum =  $\mu_{\text{CAMEL}}$  sesudah, artinya tidak terdapat perbedaan antara kinerja keuangan bank sebelum dan sesudah penyaluran dana BLBI.

$H_a$  :  $\mu_{\text{CAMEL}}$  sebelum  $\neq$   $\mu_{\text{CAMEL}}$  sesudah, artinya terdapat perbedaan antara kinerja keuangan bank sebelum dan sesudah penyaluran dana BLBI.

2. Menentukan besarnya  $\alpha$  adalah 5% untuk menguji tingkat signifikansi dengan derajat kebebasan  $n-1$ .
3. Rumus uji t dua sisi (J. Supranto, 1983)

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Dimana :

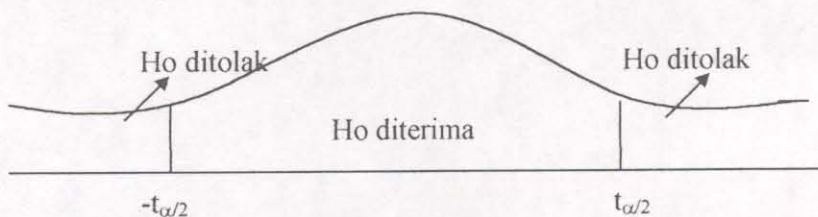
$\bar{X}_i$  : rata-rata sampel

$\delta$  : selisih rata-rata kedua sampel

$\sigma$  : standar deviasi

$n$  : Jumlah sampel

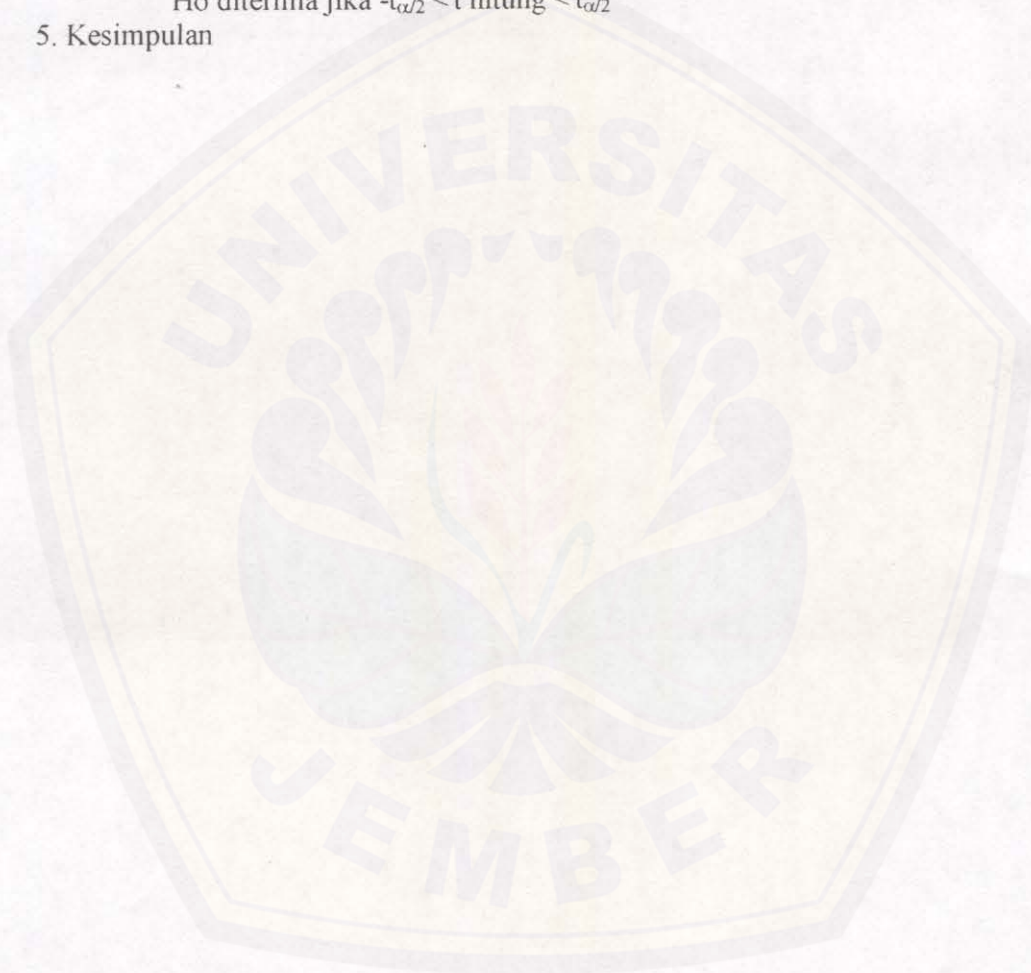
## 4. Membuat kriteria pengujian



Ho ditolak jika  $t \text{ hitung} > t_{\alpha/2}$  atau  $-t \text{ hitung} < -t_{\alpha/2}$

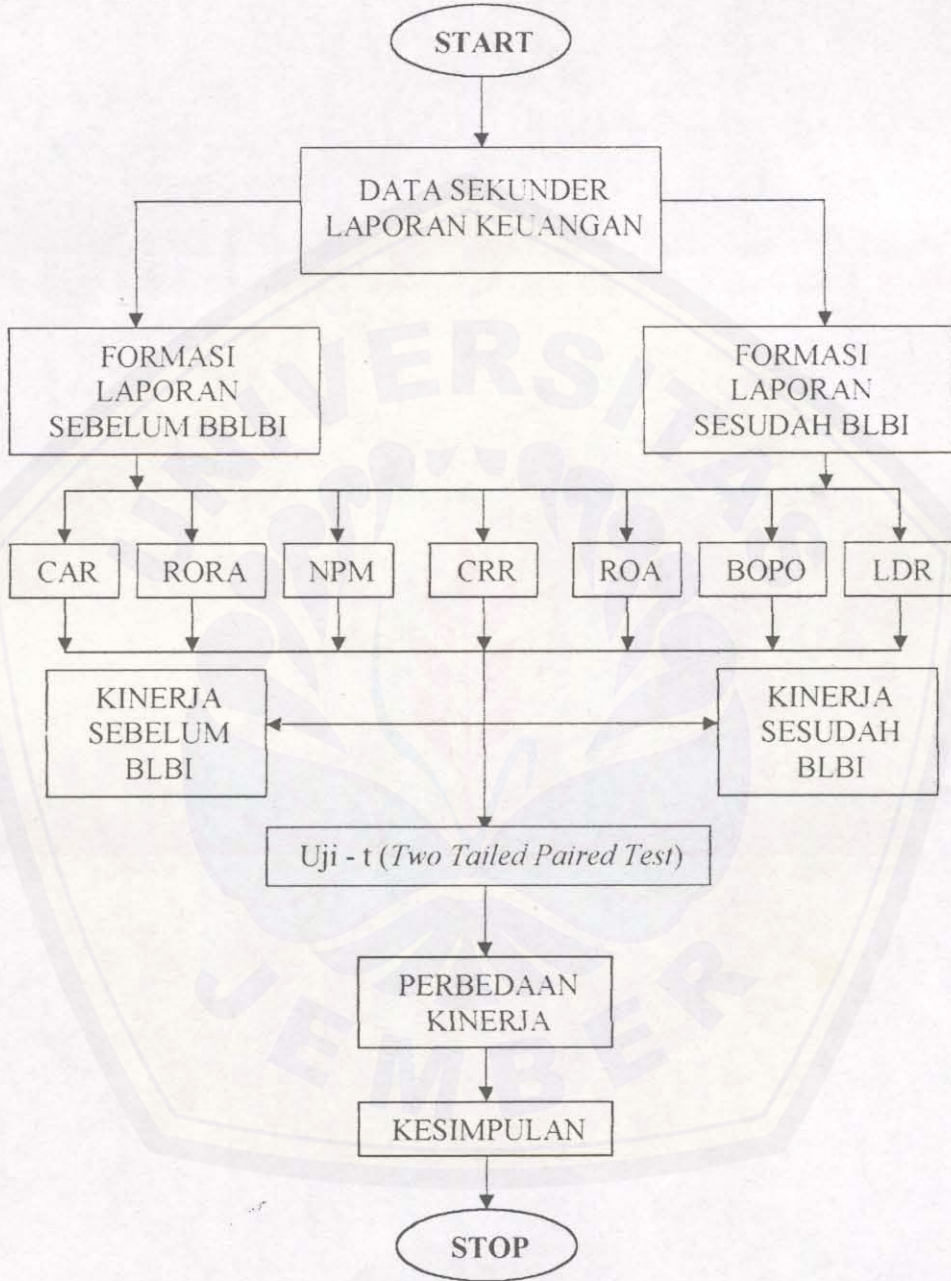
Ho diterima jika  $-t_{\alpha/2} < t \text{ hitung} < t_{\alpha/2}$

## 5. Kesimpulan



3.7 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah dalam penelitian ini ditunjukkan dalam gambar 3.1, berikut ini:



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

## KETERANGAN :

1. Penelitian ini diawali dengan pembuatan rancangan penelitian dan berbagai persiapan awal;
2. Input data sekunder berupa laporan keuangan bank (Neraca, Laba/Rugi dan laporan lainnya);
3. Data yang diperoleh dipisahkan antara data laporan keuangan sebelum dan sesudah penerimaan dana BLBI;
4. Setelah dipisahkan, dilakukan penilaian variabel CAMEL terhadap data tersebut.
5. Dari hasil penilaian dapat diketahui bagaimana kinerja bank sebelum dan sesudah penerimaan dana BLBI;
6. Selanjutnya dilakukan penilaian kinerja bank sebelum dan sesudah penerimaan dana BLBI menggunakan Uji t dua sisi (*Two Tailed Paired Test*)
7. Dari uji yang dilakukan diketahui beda dari kinerja bank sebelum dan sesudah BLBI;
8. Dari hasil beda kinerja bank tersebut dapat diambil kesimpulan apakah terdapat pengaruh atas penerimaan dana BLBI terhadap kinerja bank.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN, ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Perbankan

Sebagaimana telah disebut pada bab terdahulu, bahwa sampel penelitian ini berjumlah 3 (tiga) bank, yaitu Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, dan Bank Tiara Asia.

##### 1). Bank Central Asia (BCA)

BCA didirikan pada tahun 1955 di Semarang dengan nama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Kniting Factory (sebagai perusahaan tekstil). BCA memperoleh ijin operasi sebagai bank umum pada tanggal 27 Februari 1957 dan meningkat statusnya menjadi bank devisa pada tanggal 28 Maret 1979. Bank ini merubah statusnya dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (Tbk) pada tanggal 29 Desember 1999 yang ditandai dengan dilakukannya *Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Jakarta.

BCA merupakan bank swasta nasional dengan kapitalisasi terbesar di Indonesia dengan jumlah kantor cabang dan jaringan ATM terbesar pula. BCA sebagai bank swasta terbesar di Indonesia ternyata tidak mampu beroperasi dengan baik ketika krisis moneter melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997. Keterpurukan BCA telah membuat kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan Indonesia semakin menurun, sehingga terjadilah *rush* pada awal tahun 1998. Hal ini menandakan BCA sering dijadikan barometer perbankan di Indonesia. Untuk menyelamatkan BCA, pemerintah (BPPN) memasukan BCA kedalam BTO (Bank Take Over) pada tanggal 28 Mei 1998 dan menyuntikan dana BLBI sebesar 29,276 milyar rupiah pada akhir Desember 1998. Pada bulan Mei 1999 BCA dapat melunasi dana talangan BLBI dengan cara pengalihan ekuitas dalam bentuk saham kepada BPPN, sehingga BPPN berhak menjual kembali (divestasi) sebagian sahamnya kepada investor lain. Setelah pengalihan ekuitas itu komposisi kepemilikan BCA berubah menjadi

- |                  |       |
|------------------|-------|
| 1. Negara RI     | 92,8% |
| 2. Anthony Salim | 2,89% |



3. Soedono Salim	2,15%
4. Andree Halim	2,15%
5. Lain-lain	0,01%

## 2). Bank Danamon

Bank Danamon berdiri dengan nama Bank Kopra Indonesia pada tahun 1958 dan sampai sekarang telah berganti nama dua kali, yaitu pada tahun 1968 menjadi Bank Persatuan Indonesia dan pada tanggal 11 Desember 1976 kembali merubah namanya menjadi Bank Danamon Indonesia. Bank Danamon berstatus sebagai bank devisa mulai tanggal 5 November 1968 berdasarkan SK.Dir.BI.No.21/10/DIR/UPPS. Bank Danamon melakukan *go public* pada tanggal 8 Desember 1989.

Seperti bank-bank swasta lainnya, Bank Danamon terpuruk juga ketika krisis moneter terjadi. Akibat *rush* yang terjadi sejak awal tahun 1998 menyebabkan Bank Danamon kesulitan likuiditas. Untuk menyelamatkannya, pemerintah melalui BPPN bersama dengan Bank Indonesia menyuntikan dana BLBI dan memasukannya dalam status BTO sejak 14 Februari 1998. Adapun prosentase kepemilikan Bank Danamon setelah masuk program BLBI adalah sebagai berikut :

1. BPPN	98,97%
2. Masyarakat	1,03%

## 3). Bank Tiara Asia

Bank ini berdiri sejak tanggal 25 Januari 1989 dan berstatus bank devisa berdasarkan Sk.Dir.BI.No.24/99/Kep/DIR pada tanggal 21 Maret 1992. Bank Tiara Asia membuka kepemilikan modalnya pada pihak luar sehingga berstatus sebagai perusahaan terbuka sejak 9 Januari 1995. Pada tanggal 14 Februari 1998 bersama 6 bank swasta lainnya, Bank Tiara Asia dimasukan kedalam BTO oleh BPPN sebagai upaya pemerintah menyelamatkan bank tersebut dari masalah kesulitan likuiditas. Sejak saat itu hampir seluruh modal Bank Tiara Asia menjadi



milik pemerintah. Prosentase kepemilikan Bank Tiara Asia setelah masuk program BLBI adalah sebagai berikut:

1. BPPN 99,58%
2. Masyarakat 0,42%

## 4.2 Analisis Data

### 4.2.1 Analisis Deskriptif

#### a. Perkembangan Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Rasio CAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal bank dalam membayar kembali dana yang disimpan deposan. Perkembangan rasio CAR dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Perkembangan rasio CAR tahun 1996-1999

Bank	1996	1997	1998	1999
BCA	2,51%	1,29%	-102,47%	28,74%
Bank Danamon	9,45%	6,41%	-175,87%	-25,87%
Bank Tiara Asia	12,89%	4,19%	-274,03%	30,69%

Sumber : Lampiran 3

Pada tabel 4.1 terlihat bahwa rasio CAR BCA dari tahun 1996 sampai tahun 1998 terus mengalami penurunan, CAR terendah terjadi pada tahun 1998 (-102,47%). Hal ini terjadi karena pada tahun tersebut terjadi *rush* yang mengakibatkan BCA mengalami kesulitan likuiditas. Tapi untuk tahun 1999 terjadi peningkatan yang cukup signifikan atas rasio CAR BCA menjadi 28,74%. Peningkatan ini dikarenakan pengambilalihan (*take over*) BCA oleh BPPN telah memberikan dana segar yang cukup besar dalam bentuk obligasi.

Rasio CAR Bank Danamon menurun drastis pada tahun 1998, dari 9,45% pada tahun 1996 menjadi 6,41% pada tahun 1997 dan -175,87% pada tahun 1998. Penyebab negatifnya rasio CAR Bank Danamon sama seperti BCA yaitu akibat *rush* yang terjadi pada kwartal pertama tahun 1998. Pada tahun 1999 rasio CAR Bank Danamon masih bernilai negatif yaitu -25,87. Berdasarkan tabel 4.1, Bank Tiara Asia sebenarnya mempunyai rasio CAR yang bagus untuk tahun 1996 yaitu 12,89% (4,89% lebih tinggi dari ketentuan CAR yang ditetapkan BI) yaitu sebesar 8%. Namun terus menurun hingga mencapai -274,03% pada tahun 1998. Seperti

bank-bank lain, Bank Tiara Asia juga terpuruk ketika *rush* terjadi. Pada tahun 1999 CAR nya meningkat secara signifikan menjadi 30,69%. Peningkatan rasio CAR Bank Tiara Asia disebabkan diterimanya banyak dana segar obligasi dari tindakan *take over* yang dilakukan oleh BPPN dalam rangka program BLBI. Secara keseluruhan terdapat penurunan rasio CAR sesudah program BLBI terutama pada tahun 1998 yang lebih disebabkan oleh *rush* atas dana nasabah di ketiga bank tersebut pada kwartal pertama tahun 1998.

#### b. Perkembangan Rasio RORA (*Return On Risked Assets*)

Rasio RORA yang merupakan perbandingan antara *Earning Before Taxes* (EBT) dengan *Risked Assets* menunjukkan kemampuan bank dalam mengoptimalkan aktiva yang dimiliki untuk memperoleh laba. Tabel 4.2 menyajikan perkembangan rasio RORA selama 4 tahun pengamatan.

Tabel 4.2 Perkembangan rasio RORA tahun 1996-1999

Bank	1996	1997	1998	1999
BCA	0,86%	0,48%	-47,84%	0,27%
Bank Danamon	1,37%	0,12%	-126,2%	-87,02%
Bank Tiara Asia	2,99%	-2,34%	212,46%	0,65%

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa rasio RORA BCA terus mengalami penurunan dari tahun 1996 sampai 1998 dari 0,86% pada tahun 1996 menjadi 0,48 ditahun 1997 dan turun drastis menjadi -47,84% pada tahun 1998. Turunnya rasio RORA BCA disebabkan semakin banyaknya kredit macet yang meningkatkan *risked assets* BCA akibat banyak para debitur yang tidak melunasi pajamannya. Pada tahun 1999 rasio RORA BCA meningkat menjadi 0,27%, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi tahun 1996 dan 1997.

Kondisi Bank Danamon tidak jauh berbeda dengan BCA, bahkan lebih buruk. Rasio RORA Bank Danamon terus menurun dari tahun 1996 sampai 1998. Bahkan untuk tahun 1998 rasio RORAnya mencapai -126,2% tentunya ini merupakan suatu gambaran bahwa Bank Danamon tidak mampu menggunakan asset yang dia miliki untuk menghasilkan laba. Pada tahun 1999, sebenarnya rasio RORA Bank Danamon sudah meningkat namun masih bernilai negatif yaitu -

87,02%. Bank Tiara Asia memiliki rasio RORA yang bagus untuk tahun 1996 (2,98%), tetapi terus menurun hingga mencapai -212,46% pada tahun 1998 dan peningkatan yang terjadi pada tahun 1999 sebesar 211,81% belum bisa mengembalikan kondisi RORA Bank Tiara Asia seperti tahun 1996.

Secara keseluruhan dapat dinyatakan tidak terdapat peningkatan rasio RORA sesudah program BLBI. Hal ini disebabkan banyaknya kredit macet yang terjadi atas kredit bank yang menyebabkan semakin meningkatnya *risked assets* bank sehingga mengakibatkan rasio RORA ketiga bank tersebut mengalami penurunan setelah program BLBI.

### c. Perkembangan Rasio NPM (*Net Profit Margin*)

Rasio NPM menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan *Net Income* dari kegiatan operasi pokok bank. Tabel 4.3 menyajikan hasil penghitungan rasio NPM.

Tabel 4.3 Perkembangan rasio NPM tahun 1996-1999

Bank	1996	1997	1998	1999
BCA	3,74%	2,19%	-172,4%	3,07%
Bank Danamon	7,2%	0,2%	-438,22%	-162,43%
Bank Tiara Asia	13,08%	-13,96%	-953,19%	11,43%

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.3, rasio NPM BCA bernilai negatif pada jangka waktu 1 tahun sesudah program BLBI (tahun 1998). Jika dibandingkan dengan tahun 1996 dan 1997, rasio NPM BCA mengalami penurunan drastis pada tahun 1998. Penurunan ini disebabkan pada tahun 1998 BCA mengalami *negative spread* (pendapatan bunga < biaya bunga). Tidak seimbangny pendapatan bunga yang diterima dngan biaya bunga yang harus dikeluarkan telah menyebabkan terjadinya *negative spread* yang berimbas pada negatifnya rasio NPM BCA (-172,4%). Untuk tahun 1999 rasio NPM BCA meningkat menjadi 3,07%, peningkatan ini disebabkan membaiknya kepercayaan masyarakat terhadap bank sehingga mereka berminat kembali menyimpan dananya di bank.

Bank Danamon mengalami kondisi yang lebih parah, rasio NPMnya bernilai negatif untuk tahun 1998 (-438,22%) dan tahun 1999 (-162,43%).

Pemberian dana BLBI tidak mampu memperbaiki kemampuan bank dalam menghasilkan *net income*. Pada kedua tahun tersebut Bank Danamon mengalami *negative spread* yang parah. Rasio NPM Bank Tiara Asia menurun sebesar 27,04% (13,08% menjadi -13,96%) pada tahun 1997 dan terus menurun hingga mencapai -953,2% pada tahun 1998. Besarnya penurunan rasio NPM Bank Tiara Asia disebabkan terjadinya *negative spread* yang besar sehingga mengakibatkan rasio NPM nya bernilai negatif. Untuk tahun 1999 terjadi perbaikan rasio NPM menjadi 11,43%, hal ini menunjukkan pendapatan bunganya semakin bertambah.

Bila dibandingkan rasio NPM 2 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah program BLBI, masih lebih baik NPM sebelum daripada sesudah program BLBI. Menurunnya rasio NPM sesudah pemberian dana BLBI disebabkan oleh terjadinya *negatif spread* atas usaha bank. Banyaknya kredit bank yang mengalami kemacetan telah meningkatkan biaya operasional berlipat-lipat, sehingga bank-bank mengalami *negatif spread* yang parah.

#### d. Perkembangan Rasio CRR (*Credit Risk Ratio*)

Rasio CRR digunakan untuk mengukur risiko bank atas kemungkinan tidak kembalinya kredit yang diberikan dari total pinjamannya. Rasio CRR digambarkan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Perkembangan rasio CRR tahun 1996-1999

Bank	1996	1997	1998	1999
BCA	1,49%	1,92%	20,31%	7,63%
Bank Danamon	1,86%	0,79%	0,99%	30,05%
Bank Tiara Asia	1,02%	7,92%	68,8%	24,54%

Sumber : lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, rasio CRR BCA mengalami peningkatan 0,43% dari tahun 1996 ke tahun 1997 dan kembali meningkat hingga mencapai 20,31% pada tahun 1998. Peningkatan CRR ini disebabkan semakin banyaknya kredit BCA yang macet. Memburuknya perekonomian akibat krisis moneter dan naiknya nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika telah menyebabkan banyak debitur yang menagguhkan pembayaran pinjaman mereka bahkan ada yang berpotensi macet. Sedangkan pada tahun 1999 rasio CRR BCA mengalami

penurunan sebesar 12,68% (20,31% menjadi 7,63%). Penurunan sebesar ini diakibatkan semakin berkurangnya kredit macet BCA dan pengurangan dana pinjaman oleh pihak BCA karena trauma dengan banyaknya kredit macet pada tahun 1998.

Bank Danamon mengalami penurunan atas rasio CRR nya pada tahun 1997 sebesar 1,07% (1,86% menjadi 0,79%), ini menunjukkan tingkat kelancaran kredit Bank Danamon cukup baik untuk periode 1996-1997 karena rasio CRR nya berada pada kisaran 1%. Tetapi kondisi ini tidak berlanjut untuk jangka waktu dua tahun berikutnya, rasio CRR Bank Danamon naik menjadi 0,99% pada tahun 1998 dan naik kembali menjadi 30,05% untuk tahun 1999. Peningkatan rasio ini menggambarkan risiko kredit Bank Danamon meningkat selama dua tahun tersebut.

Bank Tiara Asia memiliki rasio CRR lebih baik dibanding dua bank lainnya, yaitu sebesar 1,02% pada tahun 1996, namun mengalami peningkatan menjadi 7,92% pada tahun 1997 dan 68,8% pada tahun 1998. Rasio CRR Bank Tiara Asia yang mencapai 68,8% pada tahun 1998 menggambarkan bahwa besarnya *bad debt* yang dimiliki oleh bank tersebut yang tentunya berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak bank.

Secara keseluruhan ketiga bank mengalami peningkatan atas rasio CRRnya sesudah pemberian dana BLBI, walaupun untuk tahun 1999 BCA menurun rasio CRRnya dibandingkan tahun 1998. Peningkatan rasio CRR ini disebabkan banyaknya kredit bank yang berpredikat *bad debt*, hal ini dapat dimaklumi karena tahun 1998 merupakan puncak keterpurukan ekonomi Indonesia saat krisis melanda.

#### **e. Perkembangan Rasio ROA (*Return On Assets*) tahun 1996-1999**

Rasio ROA merupakan rasio untuk mengetahui kemampuan bank menghasilkan laba secara relatif dibandingkan dengan total asetnya. Tabel 4.5 menunjukkan hasil penghitungan rasio ROA.

Tabel 4.5 Perkembangan rasio ROA

Bank	1996	1997	1998	1999
BCA	0,68%	0,43%	-43,81%	0,24%
Bank Danamon	1,27%	0,12%	-122,54%	-19,94%
Bank Tiara Asia	2,72%	-2,28%	-198,25%	0,25%

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.5, rasio ROA BCA selama 4 tahun pengamatan dalam kondisi tidak sehat karena dibawah ketentuan sehat ROA yang ditetapkan oleh BI sebesar 1,215%. Pada tahun 1996 rasio ROA BCA sebesar 0,68% menurun menjadi 0,43% pada tahun 1997 dan menurun kembali menjadi -43,81% pada tahun 1998. Nilai negatif rasio ROA BCA ini disebabkan terjadinya *negative spread* atas usaha BCA. Namun untuk tahun 1999 rasio ini meningkat menjadi 0,24%, suatu peningkatan yang signifikan tetapi masih tidak lebih baik dibanding kondisi tahun 1996 dan 1997.

Untuk tahun 1996 rasio ROA Bank Danamon berstatus sehat yaitu sebesar 1,27%, tentunya lebih besar dari rasio ROA yang ditetapkan BI. Seiring memburuknya kondisi Bank Danamon yang mengalami *negative spread* rasio ROA nya turun tajam menjadi -122,54% pada tahun 1998. Dari rasio ROA sekecil itu menandakan Bank Danamon mengalami kerugian yang jumlahnya lebih besar dari total aset yang dimilikinya. Sebenarnya rasio ROA Bank Danamon telah mengalami peningkatan cukup besar untuk tahun 1999 (102,6%), namun rasio ROA nya masih bernilai negatif.

Diantara dua bank lainnya, Bank Tiara Asia memiliki rasio ROA terbaik untuk tahun 1996 yaitu sebesar 2,72%, namun terus menurun menjadi 2,28% pada tahun 1997 dan -198,25% pada tahun 1998. Pada tahun 1998 kerugian yang dialami Bank Tiara Asia hampir mencapai dua kali lipat dari total asetnya.

Secara keseluruhan telah terjadi penurunan rasio ROA BCA, Bank Danamon, dan Bank Tiara Asia yang disebabkan besarnya *negative spread*. Hal ini menandakan bank belum mampu mengoptimalkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba ketika pemberian dana BLBI telah dilakukan.

#### f. Perkembangan Rasio BOPO (Biaya Operasi Pendapatan Operasi)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menggunakan biaya operasi dihubungkan dengan kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan operasi. Perkembangan rasio BOPO dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6 Perkembangan rasio BOPO tahun 1996-1999

Bank	1996	1997	1998	1999
BCA	94,9%	96,79%	279,81%	95,53%
Bank Danamon	90,47%	98,72%	537,18%	218,67
Bank Tiara Asia	81,11%	114,02%	1.055,98%	98,94%

Sumber : lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa sejak 1996 hingga 1999 rasio BOPO BCA berada pada kisaran yang cukup tinggi. Untuk tahun 1996, 1997, dan 1999 biaya operasional yang dikeluarkan BCA rata-rata 95% dari pendapatan yang diperoleh. Sedangkan untuk tahun 1998 rasio BOPOnya mencapai 279,81%, ini menandakan biaya operasional yang harus dikeluarkan BCA 2 kali lipat lebih dari pendapatan yang diterimanya. Membengkaknya biaya operasional BCA pada tahun tersebut disebabkan menurunnya aktiva produktif (diserahkan ke AMU BPPN) dan membengkaknya nilai *bad debt* yang telah meyedot laba yang diperoleh.

Bank Danamon mengalami kondisi yang tidak jauh berbeda dengan BCA, rasio BOPOnya tarus naik dari 90,47% pada tahun 1996 menjadi 98,72% pada tahun 1997 dan kembali naik mejadi 537,18% pada tahun 1998. Besarnya *bad debt* yang dimiliki Bank Danamon telah membengkakan biaya operasional mencapai lima kali lipat dari pendapatan. Rasio BOPO Bank Tiara Asia mengalami fluktuasi yang tajam, berkondisi bagus pada tahun 1996 dan berbalik menjadi sangat buruk pada tahun 1998 mencapai 1.055,98%. Besarnya biaya operasi yang dikeluarkan Bank Tiara Asia terkait dengan terlalu beraninya bank tersebut menyalurkan dananya dimana pada saat yang sama banyak bank lain yang membatasi dana pinjamannya karena dianggap kondisi perekonomian negara pada saat itu belum memungkinkan untuk melakukan penyaluran dana secara besar-besaran. Namun pada tahun 1999 rasio BOPOnya turun drastis menjadi

98,94%. Penurunan ini disebabkan pada tahun tersebut pihak bank memperoleh tambahan pendapatan dari bunga obligasi yang diberikan BPPN.

Dari uraian hasil penghitungan rasio BOPO BCA, Bank Danamon, Bank Tiara Asia di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1998 telah terjadi peningkatan tajam atas rasio BOPO ketiga bank tersebut yang disebabkan oleh membengkaknya biaya operasional yang harus ditanggung bank oleh karena berkurangnya aktiva produktif yang dimiliki bank (diantaranya diserahkan ke AMU BPPN) dan banyaknya bad debt yang telah menyedot biaya operasional. Sedangkan untuk tahun 1999, rasio BOPO mengalami penurunan yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan operasional dari bunga obligasi.

#### g. Perkembangan Rasio LDR (*Loan to Deposits Ratio*)

Rasio LDR merupakan rasio pinjaman yang diberikan terhadap deposit yang diterima dari deponan. Perkembangan rasio ini dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 Perkembangan rasio LDR tahun 1996-1999

Bank	1996	1997	1998	1999
BCA	73,29%	88,16%	93,72%	4,68%
Bank Danamon	92,52%	168,5%	242,34%	10,72%
Bank Tiara Asia	119,35%	124,91%	261,43%	88,91%

Sumber : lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa rasio LDR BCA terus naik dari 73,29% pada tahun 1996 menjadi 88,16% ditahun 1997 dan mejadi 93,72 pada tahun 1998. Namun pada tahun 1999 rasio ini turun drastis menjadi 4,68%. Penurunan ini disebabkan oleh keragu-raguan pihak BCA dalam menyalurkan pinjamannya akibat trauma dengan kredit macet yang terjadi pada tahun 1998.

Rasio LDR Bank Danamon terus mengalami peningkatan dari tahun 1996 hingga tahun 1998, bahkan untuk tahun 1998 rasio LDR nya mencapai 242,34%. Besarnya rasio LDR Bank Danamon menggambarkan terjadinya penyaluran dana pinjaman lebih besar dari dana yang diterima. Penyaluran dana yang terlalu besar pada tahun 1998 telah menyebabkan kerugian bagi Bank Danamon karena pada tahun tersebut banyak kredit yang macet sehingga menimbulkan kerugian yang



besar. Sikap hati-hati diambil pihak Danamon dalam menyalurkan dananya pada tahun 1999 hal ini terbukti dari rasio LDR yang hanya mencapai 10,72%.

Nampaknya kondisi Bank Tiara Asia sedikit berbeda dari bank lainnya karena sejak 1996 hingga 1998 rasio LDR nya berada diatas 100%, baru pada tahun 1999 rasio LDR nya turun menjadi 88,92%. Bank Tiara Asia memiliki keberanian dalam menyalurkan dananya kepada debitur.

Secara keseluruhan telah terjadi peningkatan rasio LDR pada 1 tahun sesudah penyaluran dana BLBI, namun rasio ini turun tajam pada tahun kedua pemberian dana BLBI yang disebabkan bank-bank mengambil sikap hati-hati dalam menyalurkan kreditnya akibat trauma atas banyaknya kredit macet yang terjadi pada tahun 1998.

#### 4.2.2 Uji Hipotesis

Berdasarkan pada rumusan masalah dan hipotesis yang dikemukakan di muka, maka untuk menguji kinerja perbankan sebelum dan sesudah program BLBI digunakan uji t dua sisi (*two tailed test*) dengan menggunakan bantuan komputer program *SPSS for Windows* (lihat lampiran 4).

Berikut adalah uji hipotesis antar waktu yang digunakan untuk masing-masing rasio CAMEL antara sebelum dan sesudah program BLBI sebagai berikut:

a. Pengujian 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah program BLBI (1997 dan 1998)

Ringkasan hasil uji t untuk 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah program BLBI terlihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8 Hasil uji t 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah program BLBI

Rasio	Keterangan			
	t hitung	t tabel	Signifikansi	Kesimpulan
CAR	3,729	4,303	5%	Ho diterima
RORA	2,745	4,303	5%	Ho diterima
NPM	2,307	4,303	5%	Ho diterima
CRR	-1,474	4,303	5%	Ho diterima
ROA	2,761	4,303	5%	Ho diterima
BOPO	-2,337	4,303	5%	Ho diterima
LDR	-1,903	4,303	5%	Ho diterima

Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa dari ketujuh rasio CAMEL yang digunakan tidak ada yang menunjukkan perbedaan kinerja yang signifikan antara 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah program BLBI. Dari kondisi ini dapat dikatakan bahwa pada periode ini tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara sebelum dan sesudah program BLBI.

b. Pengujian 1 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah program BLBI (1997 dan 1999)

Ringkasan hasil uji t untuk 1 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah program BLBI terlihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9 Hasil uji t 1 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah program BLBI

Rasio	Keterangan			
	t hitung	t tabel	Signifikansi	Kesimpulan
CAR	0,115	4,303	5%	Ho diterima
RORA	0,952	4,303	5%	Ho diterima
NPM	0,770	4,303	5%	Ho diterima
CRR	-2,527	4,303	5%	Ho diterima
ROA	0,829	4,303	5%	Ho diterima
BOPO	-0,805	4,303	5%	Ho diterima
LDR	2,608	4,303	5%	Ho diterima

Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa dari ketujuh rasio CAMEL yang digunakan tidak ada yang menunjukkan perbedaan kinerja yang signifikan antara 1 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah program BLBI. Dari kondisi ini dapat dikatakan bahwa pada periode ini tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara sebelum dan sesudah program BLBI.

#### 4.3 Pembahasan

Hasil dari pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap kinerja keuangan bank penerima dana BLBI yang diproksikan dalam rasio CAMEL yang terdiri dari rasio CAR, RORA, NPM, CRR, ROA, BOPO, dan LDR secara ringkas sebagai berikut:

Pengujian terhadap rasio CAMEL (CAR, RORA, NPM, CRR, ROA, BOPO, LDR) bank penerima dana BLBI dilakukan dengan menggunakan uji t dua sisi (*two tailed test*). Dari uji hipotesis yang telah dilakukan terhadap ke-7 rasio CAMEL tidak ditemukan satupun dari rasio tersebut yang mempunyai perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah program BLBI.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Trisulo Haryati (2000) dan penelitian Payamta dan Mas'ud Machfoed (1998) yang menguji tentang perbedaan rasio CAMEL perbankan antara sebelum dan sesudah *Initial Public Offering* (IPO), menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja bank yang signifikan untuk tahun-tahun sebelum dan sesudah IPO. Pada dasarnya IPO dan pemberian dana BLBI merupakan aktivitas yang berbeda, IPO merupakan tindakan perusahaan (perbankan) untuk mengubah diri menjadi perusahaan publik dengan jalan menjual sahamnya dilantai bursa, sedangkan BLBI merupakan kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan perbankan dari kesulitan likuiditas. Tetapi ada suatu kesamaan, bahwa kedua jenis peristiwa tersebut memberikan dana segar kepada bank untuk menjalankan operasionalnya.

Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sigit Mustiarbudi (2001) yang melakukan pengujian tentang perbedaan rasio CAMEL sebelum dan sesudah program rekapitalisasi yang menemukan terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah program rekapitalisasi.

Tidak terdapatnya perbedaan kinerja perbankan (BCA, Bank Danamon, dan Bank Tiara Asia) yang signifikan sebelum dan sesudah program BLBI menunjukkan bahwa pemberian dana BLBI sebagai upaya menyelamatkan bank-bank yang kekurangan likuiditas belum menampakkan hasil yang diharapkan untuk periode 2 tahun sesudah program BLBI ini dijalankan. Hal ini terkait dengan parahnya kondisi kesulitan likuiditas yang dialami bank-bank ketika dana BLBI dikucurkan sehingga menyebabkan pemberian BLBI tidak mampu secara optimal menyelamatkan kondisi bank-bank tersebut. Permasalahan yang dihadapi oleh kebanyakan bank di era krisis lebih merupakan permasalahan yang sistematis dan mengenai hampir seluruh bank di Indonesia.

Selain itu faktor penyelewengan penggunaan dana BLBI oleh bank penerima yang tidak sesuai dengan tujuan awal pemberiannya juga berpengaruh terhadap capaian pemberian dana BLBI tersebut. Besarnya penyelewengan atas penggunaan dana BLBI (Laporan BPK Tentang Hasil Audit Bank-bank Penerima BLBI) telah menyebabkan program BLBI tidak berjalan sesuai rencana dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 138.442.026.000.000 atau 96,78% dari total dana BLBI sebesar Rp 144.536.086.000.000.

Selain faktor perbankan, faktor ekonomi makro juga sangat berpengaruh terhadap efektifitas penyaluran dana BLBI karena pada saat dana BLBI dikucurkan (1998 dan 1999) kondisi perekonomian Indonesia masih buruk akibat krisis yang melanda. Sebagai bukti buruknya kondisi perekonomian pada saat itu adalah tingginya angka inflasi yang mencapai 89,8% pada bulan Maret 1998, merosotnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika hingga mencapai titik terendah pada tanggal 22 Januari 1998 yaitu Rp 16.000 per Dollarnya, tingkat suku bunga Bank Indonesia yang terus berfluktuasi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar -13,2% sepanjang tahun 1998. Selain itu faktor non ekonomi seperti terjadinya gejolak politik dan gangguan keamanan juga berpengaruh terhadap kinerja bank-bank penerima dana BLBI yang menyebabkan banyak nasabah besar yang melakukan *capital flight* dan *capital savety* ke bank-bank luar negeri.

**BAB V**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan uji hipotesis yang telah dilakukan, maka kesimpulan akhir yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Terdapat penurunan atas kinerja keuangan bank sesudah penyaluran dana BLBI yang tercermin dari hasil penghitungan rasio CAMEL yang terdiri dari CAR, RORA, RORA NPM, CRR, ROA, BOPO, dan LDR.
2. Dengan menggunakan uji t dua sisi (*two tailed test*) atas rasio CAR, RORA, NPM, CRR, ROA, BOPO, dan LDR dengan taraf signifikansi 5% diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata rasio-rasio tersebut pada 2 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah program BLBI. Tidak terdapatnya perbedaan yang signifikan atas nilai rata-rata rasio CAR, RORA, NPM, CRR, ROA, BOPO, dan LDR pada 2 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah program BLBI menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan bank (BCA, Bank Danamon, dan Bank Tiara Asia) sebelum dan sesudah program BLBI.

**5.2 Saran**

Sebagai implikasi dari hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya didasarkan pada laporan keuangan yang dipublikasikan yang belum menggambarkan kondisi perbankan secara utuh (khususnya aspek manajemen dan aspek Kualitas Aktiva Produktif), sehingga untuk penelitian berikutnya dapat menentukan metode penelitian yang tepat dan penambahan rasio keuangan yang digunakan agar mendekati pola penilaian Bank Indonesia.
2. Salah satu sebab tidak signifikannya hasil penelitian ini adalah terbatasnya jumlah bank yang dijadikan sampel penelitian, sehingga untuk penelitian

mengenai perbankan umumnya dan berkenaan dengan studi kasus khususnya hendaknya jumlah bank yang dijadikan populasi penelitian diperbanyak.

3. Bagi Bank Indonesia selaku pihak yang turut bertanggung jawab terhadap pengucuran dana BLBI hendaknya lebih teliti dan cermat dalam melakukan pengawasan terhadap bank-bank penerima dana BLBI.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hanafi, 2001. *Penilaian Kinerja Perbankan Sebelum dan Sesudah Krisis yang Listed di Bursa Efek Jakarta (BEJ)*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Jember. Jember.
- Anonim, *Kasus BLBI Lebih Dahsyat dari Skandal Bank Bali*. Kompas, 9 Maret 2000.
- Anonim, *Akibat Tidak terkoordinasi dan Semrawut, Pengucuran BLBI Bermasalah*. Kompas, 15 Maret 2000.
- Bank Indonesia, 2000. *Kebijakan Pemerintah Untuk Menyelamatkan Perekonomian Nasional*. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2002. *Mengurai Benang Kusut BLBI*. Jakarta.
- Bank Market Directory tahun 1997.
- Bank Market Directory tahun 1998.
- Bank Market Directory tahun 1999.
- Bank Market Directory tahun 2000.
- Djiwandono, Sudradjad, 1999. *Permasalahan BLBI*.
- Harjati, Trisulo, 2000. *Penilaian Kinerja Perbankan Sebelum dan Sesudah Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Jakarta*. Skripsi Universitas Jember. Jember.
- J. Supranto, Ma, 1983. *Statistik Teori dan Aplikasi II*. Edisi III. Erlangga. Jakarta
- Manulang, 1996. *Dasar-dasar Manajemen*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Muljono, Teguh Pudjo, 1999. *Analisis Laporan Keuangan Untuk Perbankan*. Edisi Revisi. Djambatan. Jakarta.
- Mustiarbudi, Sigit, 2001. *Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank Umum Sebelum dan Sesudah Program Rekapitalisasi*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Jember. Jember.
- Payamta dan Mas'ud Machfoedz, 1999. *Evaluasi Kinerja Perusahaan Perbankan Sebelum dan Sesudah Menjadi Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ)*. Dalam Majalah Kelola No.20/VIII/1999. Jakarta.

- Prasetianto, A. Tony, Marcello Theodore, A. Prasetyantoko, Liberty Simanjuntak, Arief Ramelan Kusno, dan L. Widarto, 2000. *Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Riyanto, Bambang, 1995. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, BPFE. Yogyakarta.
- Siamat, Dahlan, 1999. *Manajemen Lembaga Keuangan. Lembaga*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Siaran Pers BPK RI Tentang Hasil Audit Investigasi Atas Penyaluran dan Penggunaan BLBI.
- SE Dir BI Nomor 26/23/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1993 Tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- SE Dir BI Nomor 31/148/Kep/Dir tanggal 12 November 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif.
- Susilo, Y.Sri dan Sigit Triandaru, 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Suyatno, Thomas, Djuhaepah T. Marala, dan Azhar Abdullah, 1997. *Kelembagaan Perbankan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Tunggal, Amin Wijaya, 1995. *Kamus Bisnis dan Manajemen*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Weston, J.Fred dan Copeland, Thomas E, 1995. *Manajemen Keuangan Jilid II* Bina Rupa Aksara. Jakarta.



# Lampiran-lampiran



**Lampiran I**

Data Keuangan Bank Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Bank

## 1. BCA

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	1996	1997	1998	1999
Fixed Assets	1.108.029	1.347.234	1.430.086	2.404.372
Total Loan	22.982.574	39.879.568	49.935.709	4.111.917
Securities	6.871.676	4.632.479	4.247.895	7.088.253
Risked Assets	27.889.041	47.069.578	61.985.953	86.600.790
Total Assets	35.261.701	52.638.326	67.684.570	96.261.083
Bad Debt (PPAP)	342.773	763.740	10.142.036	313.665
Deposits	31.356.805	45.235.421	53.280.550	87.802.166
Equity Capital	1.856.716	1.922.553	-54.094.053	5.623.838
EBT	239.435	225.630	-29.654.854	234.286
Net Income	168.948	151.668	-28.403.516	641.292
Operational Income	4.519.569	6.913.175	16.476.029	20.867.809
Operational Expenses	4.289.290	6.691.536	46.100.745	19.935.427

## 2. Bank Danamon

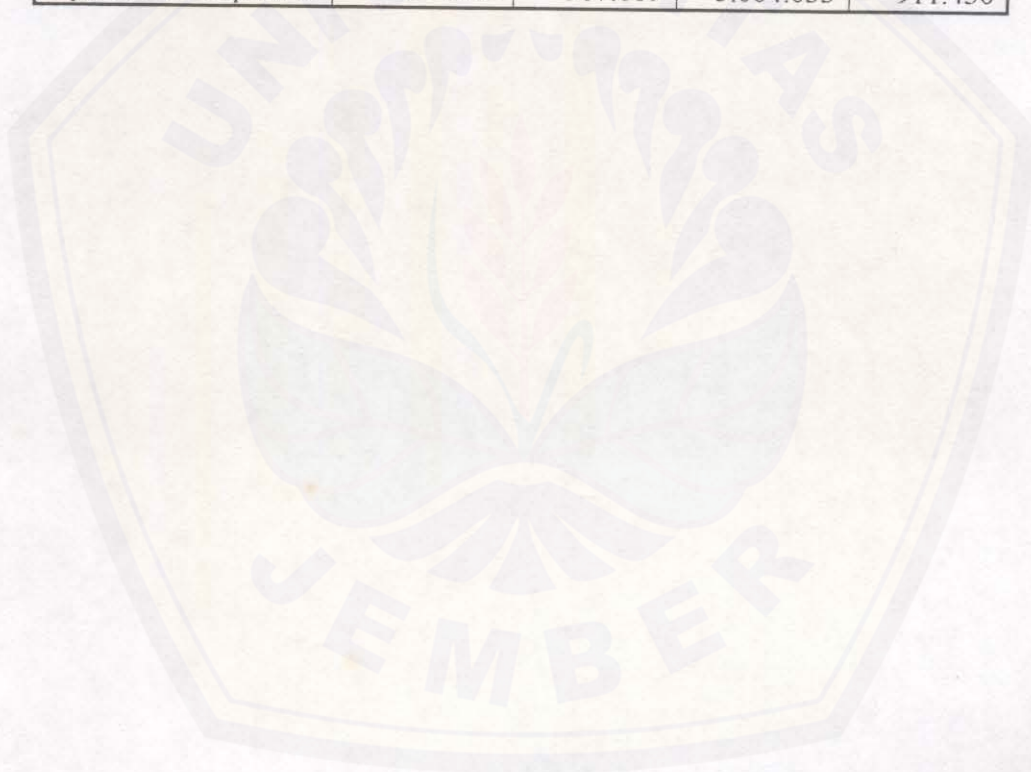
(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	1996	1997	1998	1999
Fixed Assets	315.535	194.556	308.432	286.302
Total Loans	16.989.580	24.646.731	31.199.117	2.073.614
Securities	1.263.443	348.695	177.031	19.135.891
Risked Assets	20.396.833	27.343.975	22.065.300	5.968.523
Total Assets	21.928.081	28.142.297	22.722.963	26.039.912
Bad Debt (PPAP)	315.535	194.556	308.432	623.210
Deposits	18.362.443	14.627.060	12.874.137	19.343.651
Equity Capital	2.039.550	1.795.802	-55.490.848	-5.201.058
EBT	278.919	33.020	-27.845.665	-5.193.482
Net Income	199.852	9.626	-27.845.665	-6.987.533
Operational Income	2.776.662	4.815.425	6.354.318	4.301.870
Operational Expenses	2.511.924	4.753.944	34.134.182	9.406.686

## 3. Bank Tiara Asia

(Dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	1996	1997	1998	1999
Fixed Assets	59.552	67.691	65.310	67.603
Total Loans	1.765.478	1.408.873	3.149.789	1.107.732
Securities	183.111	62.469	136.614	2.483.863
Risked Assets	1.978.893	2.707.538	2.160.520	1.553.720
Total Assets	2.169.456	2.781.304	2.315.348	4.059.423
Bad Debt (PPAP)	18.017	111.646	2.166.903	271.844
Deposits	1.479.223	1.127.894	1.204.824	1.245.828
Equity Capital	310.729	129.375	-8.940.372	1.169.742
EBT	59.049	-63.397	-4.590.246	10.145
Net Income	41.060	-63.397	-4.571.093	105.282
Operational Income	313.815	454.025	479.558	921.150
Operational Expenses	254.535	517.689	5.064.033	911.430



**Lampiran 2****Penghitungan Rasio CAMEL****1. Penghitungan CAR****a. BCA**

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	1996	1997	1998	1999
Equity Capital	1.856.716	1.922.553	-54.094.053	5.623.838
Fixed Assets	1.108.029	1.347.234	1.430.086	2.404.372
Total Loans	22.982.574	39.879.568	49.935.709	4.111.917
Securities	6.871.676	4.632.479	4.247.895	7.088.253
CAR	2,51%	1,29%	-102,47%	28,74%

**b. Bank Danamon**

Keterangan	1996	1997	1998	1999
Equity Capital	2.039.550	1.795.802	-55.490.848	-5.201.058
Fixed Assets	315.535	194.556	308.432	286.302
Total Loans	16.989.580	24.646.731	31.199.117	2.073.614
Securities	1.263.44.	348.695	177.031	19.135.891
CAR	9,45%	6,41%	-175,87%	-25,87%

**c. Bank Tiara Asia**

Keterangan	1996	1997	1998	1999
Equity Capital	310.729	129.375	-8.940.372	1.169.742
Fixed Assets	59.552	67.691	65.310	67.603
Total Loans	1.765.478	1.408.873	3.149.789	1.107.732
Securities	1.978.893	2.707.538	2.160.520	1.553.720
CAR	12,89%	4,19%	-274,03%	30,69%

**2. Penghitungan RORA****a. BCA**

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	1996	1997	1998	1999
EBT	239.435	225.630	-29.654.854	234.286
Risked Assets	27.889.041	47.069.578	61.985.953	86.600.790
RORA	0,86%	0,48%	-47,84%	0,27%

## b. Bank Danamon

Keterangan	1996	1997	1998	1999
EBT	278.919	33.020	-27845.665	-5.193.482
Risked Assets	20.396.833	27.343.975	22.065.300	5.968.523
RORA	1,37%	0,12%	-126,2%	-87,02%

## c. Bank Tiara Asia

Keterangan	1996	1997	1998	1999
EBT	59.049	-63.397	-4.590.246	10.145
Risked Assets	1.978.893	2.707.538	2.160.520	1.553.720
RORA	2,99%	-2,34%	212,46%	0,65%

## 3. Penghitungan NPM

## a. BCA

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	1996	1997	1998	1999
Net Income	168.948	151.668	-28.403.516	641.292
Operating Income	4.519.569	6.913.175	16.476.029	20.867.809
NPM	3,74%	2,19%	-172,4%	3,07%

## b. Bank Danamon

Keterangan	1996	1997	1998	1999
Net Income	199.852	9.626	-27.845.665	5.193.482
Operating Income	2.776.662	4.815.425	6.354.318	4.301.870
NPM	7,2%	0,2%	-438,22%	-162,43%

## c. Bank Tiara Asia

Keterangan	1996	1997	1998	1999
Net Income	41.060	-63.397	-4.571.093	105.282
Operating Income	313.815	454.025	479.558	921.150
NPM	13,08%	-13,96%	-953,19%	11,43%

## 4. Penghitungan CRR

## a. BCA

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	1996	1997	1998	1999
Bad Debt (PPAP)	342.773	763.740	10.142.036	313.665
Total Loans	22.982.574	39.879.568	49.935.709	4.111.917
CRR	1,49%	1,92%	20,31%	7,63%

## b. Bank Danamon

Keterangan	1996	1997	1998	1999
Bad Debt (PPAP)	315.535	194.556	308.432	623.210
Total Loans	16.989.580	24.646.731	31.199.117	2.073.614
CRR	1,86%	0,79%	0,99%	30,05%

## c. Bank Tiara Asia

Keterangan	1996	1997	1998	1999
Bad Debt (PPAP)	18.017	111.646	2.166.903	271.844
Total Loans	1.765.478	1.408.873	3.149.789	1.107.732
CRR	1,02%	7,92%	68,8%	24,54%

## 5. Penghitungan ROA

## a. BCA

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	1996	1997	1998	1999
EBT	239.435	225.630	-29.654.854	234.286
Total Assets	35.261.701	52.638.326	67.684.570	96.261.083
ROA	0,68%	0,43%	-43,81%	0,24%

## b. Bank Danamon

Keterangan	1996	1997	1998	1999
EBT	278.919	33.020	-27845.665	-5.193.482
Total Assets	21.928.081	28.142.297	22.722.963	26.039.912
ROA	1,27%	0,12%	-122,54%	-19,94%

## c. Bank Tiara Asia

Keterangan	1996	1997	1998	1999
EBT	59.049	-63.397	-4.590.246	10.145
Total Assets	2.169.456	2.781.304	2.315.348	4.059.423
ROA	2,72%	-2,28%	-198,25%	0,25%

## 6. Penghitungan BOPO

## a. BCA

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	1996	1997	1998	1999
Biaya Operasional	4.289.290	6.691.536	46.100.745	19.935.427
Pend. Operasional	4.519.569	6.913.175	16.476.029	20.867.809
BOPO	94,9%	96,79%	279,81%	95,53%

## b. Bank Danamon

Keterangan	1996	1997	1998	1999
Biaya Operasional	2.511.924	4.753.944	34.134.182	9.406.686
Pend. Operasional	2.776.662	4.815.425	6.354.318	4.301.870
BOPO	90,47%	98,72%	537,18%	218,67

## c. Bank Tiara Asia

Keterangan	1996	1997	1998	1999
Biaya Operasional	254.535	517.689	5.064.033	911.430
Pend. Operasional	313.815	454.025	479.558	921.150
BOPO	81,11%	114,02%	1.055,98%	98,94%

## 7. Penghitungan LDR

## a. BCA

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	1996	1997	1998	1999
Total Loans	22.982.574	39.879.568	49.935.709	4.111.917
Deposits	31.356.805	45.235.421	53.280.550	87.802.166
LDR	73,29%	88,16%	93,72%	4,68%

## b. Bank Danamon

Keterangan	1996	1997	1998	1999
Total Loans	16.989.580	24.646.731	31.199.117	2.073.614
Deposits	18.362.443	14.627.060	12.874.137	19.343.651
LDR	92,52%	168,5%	242,34%	10,72%

## c. Bank Tiara Asia

Keterangan	1996	1997	1998	1999
Total Loans	1.765.478	1.408.873	3.149.789	1.107.732
Deposits	1.479.223	1.127.894	1.204.824	1.245.828
LDR	119,35%	124,91%	261,43%	88,91%

**Lampiran 3**

## Hasil Penghitungan Rasio CAMEL

## 1. CAR

Bank	1996	1997	1998	1999
BCA	2,51%	1,29%	-102,47%	28,74%
Bank Danamon	9,45%	6,41%	-175,87%	-25,87%
Bank Tiara Asia	12,89%	4,19%	-274,03%	30,69%

## 2. RORA

Bank	1996	1997	1998	1999
BCA	0,86%	0,48%	-47,84%	0,27%
Bank Danamon	1,37%	0,12%	-126,2%	-87,02%
Bank Tiara Asia	2,99%	-2,34%	212,46%	0,65%

## 3. NPM

Bank	1996	1997	1998	1999
BCA	3,74%	2,19%	-172,4%	3,07%
Bank Danamon	7,2%	0,2%	-438,22%	-162,43%
Bank Tiara Asia	13,08%	-13,96%	-953,19%	11,43%

## 4. CRR

Bank	1996	1997	1998	1999
BCA	1,49%	1,92%	20,31%	7,63%
Bank Danamon	1,86%	0,79%	0,99%	30,05%
Bank Tiara Asia	1,02%	7,92%	68,8%	24,54%

## 5. ROA

Bank	1996	1997	1998	1999
BCA	0,68%	0,43%	-43,81%	0,24%
Bank Danamon	1,27%	0,12%	-122,54%	-19,94%
Bank Tiara Asia	2,72%	-2,28%	-198,25%	0,25%

## 6. BOPO

Bank	1996	1997	1998	1999
BCA	94,9%	96,79%	279,81%	95,53%
Bank Danamon	90,47%	98,72%	537,18%	218,67
Bank Tiara Asia	81,11%	114,02%	1.055,98%	98,94%

## 7. LDR

Bank	1996	1997	1998	1999
BCA	73,29%	88,16%	93,72%	4,68%
Bank Danamon	92,52%	168,5%	242,34%	10,72%
Bank Tiara Asia	119,35%	124,91%	261,43%	88,91%



## Lampiran 4

## T-Test

## Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	car97	3.96E-02	3	2.565E-02	1.481E-02
	car98	-1.84126	3	,86074660	,49695228
Pair 2	ror97	-5.8E-03	3	1.535E-02	8.864E-03
	ror98	-1.28833	3	,82341143	,47539681
Pair 3	npm97	-3.9E-02	3	8.809E-02	5.086E-02
	npm98	-5.21266	3	3,96967978	2,29189569
Pair 4	crr97	3.54E-02	3	3.836E-02	2.215E-02
	crr98	,30031333	3	,34932923	,20168532
Pair 5	roa97	-5.8E-03	3	1.482E-02	8.554E-03
	roa98	-1.21537	3	,77224928	,44585833
Pair 6	bopo97	1.031798	3	9.439E-02	5.450E-02
	bopo98	6.243216	3	3,95356358	2,28259100
Pair 7	ldr97	1.271909	3	,40218911	,23220399
	ldr98	1.991646	3	,91813348	,53008461

## Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	car97 & car98	3	-,495	,670
Pair 2	ror97 & ror98	3	,929	,241
Pair 3	npm97 & npm98	3	,974	,145
Pair 4	crr97 & crr98	3	,991	,085
Pair 5	roa97 & roa98	3	,909	,274
Pair 6	bopo97 & bopo98	3	,974	,146
Pair 7	ldr97 & ldr98	3	,780	,431

Paired Samples Test

	Paired Differences							t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		Upper	Lower			
				Upper	Lower					
Pair 1 car97 - car98	1,880894	,87372409	,50444484	-,289557	4,051345	3,729	2	,065		
Pair 2 rora97 - rora98	1,282524	,80916647	,46717248	-,727557	3,292605	2,745	2	,111		
Pair 3 npm97 - npm98	5,174096	3,88391866	2,24238149	-4,47409	14,82228	2,307	2	,147		
Pair 4 crr97 - crr98	-,264883	,31134917	,17975753	-1,03832	,50855088	-1,474	2	,279		
Pair 5 roa97 - roa98	1,209590	,75880523	,43809640	-,675387	3,094566	2,761	2	,110		
Pair 6 bopo97 - bopo98	-5,21142	3,86169941	2,22955319	-14,8044	4,381574	-2,337	2	,144		
Pair 7 idr97 - ldr98	-,719737	,65498676	,37815678	-2,34681	,90734065	-1,903	2	,197		

## T-Test

## Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	car97	3.96E-02	3	2.565E-02	1.481E-02
	car99	1.98E-02	3	,27324654	,15775897
Pair 2	rora97	-5.8E-03	3	1.535E-02	8.864E-03
	rora99	-.286972	3	,50505058	,29159109
Pair 3	npm97	-3.9E-02	3	8.809E-02	5.086E-02
	npm99	-.493092	3	,98054572	,56611834
Pair 4	crr97	3.54E-02	3	3.836E-02	2.215E-02
	crr99	,20741033	3	,11685890	6.747E-02
Pair 5	roa97	-5.8E-03	3	1.482E-02	8.554E-03
	roa99	-6.5E-02	3	,11657078	6.730E-02
Pair 6	bopo97	1.031798	3	9.439E-02	5.450E-02
	bopo99	1.377139	3	,70126444	,40487522
Pair 7	ldr97	1.271909	3	,40218911	,23220399
	ldr99	,34772833	3	,46985804	,27127266

## Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 car97 & car99	3	-,994	,071
Pair 2 rora97 & rora99	3	-,399	,739
Pair 3 npm97 & npm99	3	-,437	,712
Pair 4 crr97 & crr99	3	,138	,912
Pair 5 roa97 & roa99	3	-,407	,733
Pair 6 bopo97 & bopo99	3	-,387	,747
Pair 7 ldr97 & ldr99	3	,015	,990

Paired Samples Test

	Paired Differences							df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t			
				Lower	Upper				
Pair 1 car97 - car99	1.98E-02	,29874523	,17248064	-.722292	,76195663	,115	2	,919	
Pair 2 rora97 - rora99	,28116933	,51136919	,29523914	-.989142	1.551481	,952	2	,441	
Pair 3 npm97 - npm99	,45452767	1,02215873	,59014362	-2.08466	2.993711	,770	2	,522	
Pair 4 crr97 - crr99	-,171980	,11786679	6.805E-02	-.464778	,12081701	-2,527	2	,127	
Pair 5 roa97 - roa99	5.91E-02	,12333848	7.121E-02	-.247331	,36544843	,829	2	,494	
Pair 6 bopo97 - bopo99	-,345342	,74287035	,42889639	-2.19073	1.500051	-,805	2	,505	
Pair 7 ldr97 - ldr99	,92418067	,61382568	,35439242	-.600647	2.449008	2.608	2	,121	

**T-Test**

**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	car96	8.28E-02	3	5.288E-02	3.053E-02
	car98	-1.84126	3	,86074660	,49695228
Pair 2	rora96	1.74E-02	3	1.110E-02	6.407E-03
	rora98	-1.28833	3	,82341143	,47539681
Pair 3	npm96	8.01E-02	3	4.725E-02	2.728E-02
	npm98	-5.21266	3	3,96967978	2,29189569
Pair 4	crr96	1.46E-02	3	4.195E-03	2.422E-03
	crr98	,30031333	3	,34932923	,20168532
Pair 5	roa96	1.56E-02	3	1.051E-02	6.068E-03
	roa98	-1.21537	3	,77224928	,44585833
Pair 6	bopo96	,88826780	3	7.042E-02	4.066E-02
	bopo98	6.243216	3	3,95356358	2,28259100
Pair 7	ldr96	,95056327	3	,23133211	,13355966
	ldr98	1.991646	3	,91813348	,53008461

**Paired Samples Correlations**

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	car96 & car98	3	-,962	,175
Pair 2	rora96 & rora98	3	-,965	,168
Pair 3	npm96 & npm98	3	-,999	,021
Pair 4	crr96 & crr98	3	-,985	,109
Pair 5	roa96 & roa98	3	-,969	,158
Pair 6	bopo96 & bopo98	3	-1,000	,007
Pair 7	ldr96 & ldr98	3	,871	,327

Paired Samples Test

	Paired Differences							t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		Upper				
				Lower	Upper					
Pair 1 car96 - car98	1.924067	,91175540	,52640223	-.340859	4.188993	3,655	2	,067		
Pair 2 rora96 - rora98	1.305693	,83412807	,48158407	-.766396	3.377782	2,711	2	,113		
Pair 3 npm96 - npm98	5.292726	4,01690616	2,31916185	-4.68582	15.27127	2,282	2	,150		
Pair 4 crr96 - crr98	-.285749	,35346334	,20407216	-1.16380	,59230228	-1,400	2	,296		
Pair 5 roa96 - roa98	1.230943	,78243901	,45174137	-.712744	3.174629	2,725	2	,112		
Pair 6 bopo96 - bopo98	-5.35495	4,02397933	2,32324555	-15.3511	4.641170	-2,305	2	,148		
Pair 7 ldr96 - ldr98	-1.04108	,72571987	,41899456	-2.84387	,76170569	-2,485	2	,131		

## T-Test

## Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	car96	8.28E-02	3	5.288E-02	3.053E-02
	car99	1.98E-02	3	,27324654	,15775897
Pair 2	rora96	1.74E-02	3	1.110E-02	6.407E-03
	rora99	-.286972	3	,50505058	,29159109
Pair 3	npm96	8.01E-02	3	4.725E-02	2.728E-02
	npm99	-.493092	3	,98054572	,56611834
Pair 4	crr96	1.46E-02	3	4.195E-03	2.422E-03
	crr99	,20741033	3	,11685890	6.747E-02
Pair 5	roa96	1.56E-02	3	1.051E-02	6.068E-03
	roa99	-.6.5E-02	3	,11657078	6.730E-02
Pair 6	bopo96	,88826780	3	7.042E-02	4.066E-02
	bopo99	1.377139	3	,70126444	,40487522
Pair 7	ldr96	,95056327	3	,23133211	,13355966
	ldr99	,34772833	3	,46985804	,27127266

## Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 car96 & car99	3	-,630	,567
Pair 2 rora96 & rora99	3	,292	,812
Pair 3 npm96 & npm99	3	,190	,878
Pair 4 crr96 & crr99	3	,165	,894
Pair 5 roa96 & roa99	3	,236	,849
Pair 6 bopo96 & bopo99	3	,178	,886
Pair 7 ldr96 & ldr99	3	,934	,232

Paired Samples Test

	Paired Differences							df	t	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		Upper	Lower			
				Upper	Lower					
Pair 1 car96 - car99	6.30E-02	,30927729	,17856133	-,705282	,83129306	,353	2	,758		
Pair 2 rora96 - rora99	,30433843	,50192541	,28978677	-,942513	1.551190	1,050	2	,404		
Pair 3 npm96 - npm99	,57315780	,97266113	,56156617	-,184307	2.989382	1,021	2	,415		
Pair 4 crr96 - crr99	-,192846	,11624056	6.711E-02	-,481604	9.59E-02	-2,874	2	,103		
Pair 5 roa96 - roa99	8.04E-02	,11455046	6.614E-02	-,204147	,36497086	1,216	2	,348		
Pair 6 bopo96 - bopo99	-,488872	,69223198	,39966032	-,220847	1.230728	-1,223	2	,346		
Pair 7 ldr96 - ldr99	,60283493	,26676770	,15401840	-,60E-02	1.265523	3,914	2	,060		



NO	Jenis	Jangka Waktu	Suku Bunga	Peruntukan
1	Fasilitas Diskonto I (Fasdis I)	2 hari		
2	Fasilitas diskonto II (Fasdis II)	90 hari		
3	Kredit Likuiditas Darurat	6 bulan	16% pertahun	Penyehatan bank
4	Kredit Subordinasi	20 tahun	6% capping	Penyehatan bank
5	SBPU Lelang	3 bulan	Diskon 2% di atas SBI bilateral	Pelonggaran likuiditas
6	SBPU tanpa lelang	3 minggu sampai 3 bulan	Rata-rata tertimbang diskonto SBI lelang terakhir	Memenuhi kebutuhan likuiditas harian
7	Saldo Giro Negatif/Debet	Kondisi hari terjadi saldo debet	125% dari rata-rata JIBOR	Menjaga kestabilan sistem perbankan
8	Fasilitas Diskonto I Repo	7 hari	Diskonto 28%	Membantu bank sehat yang tidak memiliki SBI tetapi kesulitan likuiditas
9	SBPU Khusus	3 s/d 18 bulan	Diskonto 27% pertahun	Merupakan pengalihan Fasdis I repo, Fasdis II repo, dan saldo debet
10	Fasilitas Diskonto	1 bulan	125% dari rata-rata JIBOR overnight satu bulan sebelumnya	Menutupi pelanggaran GWM atau mengantisipasi saldo giro negative
11	Fasilitas dana talangan bank likuidasi dan bank dibekukan			Pembayaran terhadap nasabah bank dilikuidasi dan BBO
12	Jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum			Blanket guarantee
13	Kewajiban pemerintah terhadap kewajiban pembayaran BPR			Blanket guarantee
14	Dana talangan untuk pembayaran kewajiban terhadap bank luar negeri dalam rangka trade finance dan inter bank debt arrears	Maksimum 2 bulan	Valas : LIBOR 1 tahun - 10% Rupiah SBI 1 tahun + 2%	Pemulihan kepercayaan terhadap perbankan nasional
15	Jaminan pembiayaan perdagangan internasional			Untuk menggaikahkan perdagangan internasional

Sumber : Bank Indonesia